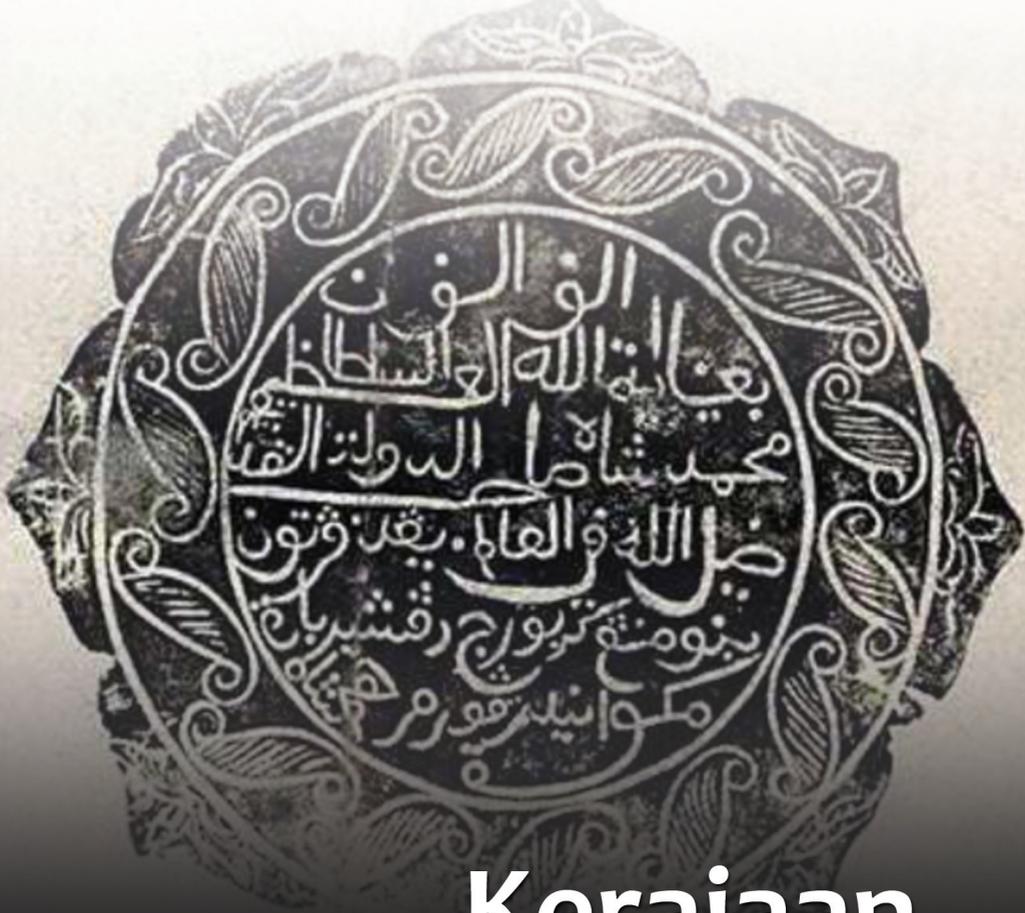


Prof. Dr. (Phil.) Gusti Asnan, dkk.



Kerajaan Inderapura

Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Prof. Dr. (Phil.) Gusti Asnan, dkk.

KERAJAAN INDERAPURA

Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Penulis:

Prof. Dr. (Phil.) Gusti Asnan
Drs. Yulizal Yunus, M. Si.
Drs. Irhash A. Shamad, M. Hum
Drs. Muhapril Musri, M. Ag.
Masmedia Pinem, M.Ag.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All rights reserved

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Kerajaan Inderapura

Editor:

Ridwan Bustaman, M.Hum

x + 123 halaman; 14,8 x 21 cm

Penerbit:

Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jl. MH. Thamrin No. 6 Lt. 18 Jakarta

Desain & Layout: Arif Syibromalisi

Cetakan I, Desember 2013

ISBN : 978-602-8766-84-5

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	şa	ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain [‘] ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

KATA PENGANTAR

Kepala Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan

Syukur alhamdulillah, penerbitan hasil kajian sejarah Kesultanan Inderapura ini akhirnya dapat dihadirkan. Seperti penerbitan sejenis pada tahun sebelumnya, penerbitan buku ini pun didasarkan atas hasil kajian dan penulisan yang dilakukan oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, bekerjasama dengan IAIN Imam Bonjol, Padang dengan melibatkan tenaga ahli serta sejarahwan setempat.

Tentunya buku ini belum merupakan hasil yang sempurna. Sebagai langkah awal, terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari segi metodologi, kerangka teori, kelengkapan dan pengolahan data, sumber rujukan, dan fokus kajian. Tetapi, sesederhana apa pun, penerbitan hasil kajian ini penting dilakukan, sedikitnya untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, serta merangsang para peneliti dan sejarahwan lain untuk melakukan penelitian lebih jauh, lebih lengkap, dan dengan data yang lebih kaya. Hanya dengan cara ini kekayaan khazanah kita dapat diungkap, dan dengan cara ini pula generasi muda masa kini mengenali khazanah budaya keagamaan pada masa lalunya yang kaya dan penuh makna.

Usaha ini diharapkan dapat memberikan pijakan ke arah penguatan orientasi keagamaan di Indonesia ke depan, sesuai dengan corak dan khazanah keagamaan yang telah

tertanam dalam di masa lalu, sambil mengambil usaha inovatif yang relevan di masa kini. Kurang lebih, inilah spirit yang dapat diambil dari kaidah ushul yang sangat populer, *al-muhafadah 'alā al-qadīm al-ṣālih wa al-akhz bi al-jadīd al-aṣlah*, yakni memelihara warisan lama yang baik, dan pada saat bersamaan, mengambil inovasi baru yang lebih baik.

Kurang lebih, untuk tujuan itulah penulisan dan penerbitan sejarah Kesultanan Inderapura dilakukan. Kajian dan penulisan sejarah kesultanan ini penting dilakukan, karena beberapa alasan. *Pertama*, posisi kesultanan sebagai pusat kekuasaan di masa lalu. Dengan posisi ini kita dapat mengenali pelbagai ekspresi dan manifestasi sosial-politik dan kekuasaan yang berkembang dalam komunitas Muslim sepanjang perjalanan sejarahnya. Pada titik ini, kita juga dapat melihat kentalnya sentuhan kultural lokal pada sistem dan struktur kekuasaan yang berlangsung di Kesultanan Inderapura. Sebagai pusat kekuasaan pada zamannya, para sultan memiliki strategi masing-masing dalam menciptakan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat serta penguatan kekuasaannya, terutama dalam merespons dominasi perdagangan VOC dan aneksasi kekuasaan oleh kolonialisme Belanda. Dengan mengetahui ekspresi kekuasaan dan politik para sultan, kita antara lain dapat memahami secara persis tentang berbagai ekspresi prinsip-prinsip politik Islam itu sendiri, antara lain musyawarah (*syura*), keadilan (*'adalah*), persamaan (*musawah*), ikatan serta sumpah setia (*'ahd*), dan sebagainya.

Kedua, kedudukan kesultanan sebagai pusat kebudayaan. Kesultanan Inderapura memiliki dan mengembangkan pelbagai ekspresi seni budaya, struktur bahasa, sastra, corak bangunan, adat istiadat, sistem keluarga, etika sosial, aneka kuliner, alat-alat rumah tangga, desain pakaian, budaya keagamaan, dan sebagainya dari masyarakat Minangkabau. Pelbagai jenis dan unsur budaya ini dikembangkan secara massif ke berbagai daerah di Sumatera Barat yang menjadi wilayah kekuasaannya, untuk kemudian menjadi identitas budaya lokal yang bernilai tinggi dan patut dilestarikan masyarakat Minangkabau.

Ketiga, istana kesultanan sebagai pusat keilmuan. Tidak sedikit sultan dan penguasa serta para pembantunya yang sekaligus menjadi ulama, sastrawan, penulis produktif, dan pemikir keagamaan yang jenius. Berpijak pada fakta sejarah, penulisan sejarah Kesultanan Inderapura juga diharapkan mampu mengungkap pelbagai nilai-nilai keislaman, terutama yang terdapat dalam *Naskah (Manuskrip) Inderapura* dan *Naskah Tambo Minangkau*, yang menjadi sumber informasi utama dalam penulisan ini.

Keempat, kesultanan sebagai pusat keagamaan. Sebagai kelompok yang diyakini Wakil Tuhan di bumi (Islam, *Khalifatullah*), para raja atau sultan di Inderapura dipandang sebagai pemilik otoritas yang mesti diikuti. Artinya, islamisasi istana dan wilayah kekuasaannya sekaligus menjadikan fungsi kesultanan sebagai pusat keagamaan. Dalam kasus di Inderapura misalnya, terdapat peran wazir atau *labia* yang dipercaya oleh sultan sebagai guru yang bijak dan arif, yang

mengajarkan dan menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat.

Ala kulli hal, sedikitnya berdasarkan empat alasan tersebut di atas, penulisan dan penerbitan buku *Dinamika Sistem Birokrasi pada Masa Kesultanan Inderapura Abad XVI-Awal Abad XX M* menjadi sangat penting dilakukan. Bahwa terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan yang memang kami sadari sepenuhnya, tetap tidak mengurangi urgensi dari usaha ini. Karena itu, atas nama Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada siapa pun yang telah ikut terlibat dan memberikan kontribusi pada usaha penulisan sejarah kesultanan ini, baik sebagai peneliti, penulis, editor, narasumber, informan, dan pelbagai kontribusi lainnya.

Semoga usaha ini dapat terus dilakukan, dengan kualitas yang lebih baik.

Jakarta, Desember 2013

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, identifying the author as Choirul Fuad Yusuf.

Choirul Fuad Yusuf

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II ALAM INDERAPURA.....	15
A. Posisi Geografis dan Potensi Alam Inderapura.....	15
B. Inderapura Sebagai Subkultur Minangkabau	28
BAB III INDERAPURA DALAM JARINGAN PERDAGANGAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL	33
A. Pantai Barat Sumatera dalam Perdagangan Regional dan Internasional..	33
B. Inderapura sebagai Salah Satu <i>Intraport</i> Pantai Barat Sumatera.....	42
C. Perdagangan di Kesultanan Inderapura	45
BAB IV ISLAM DALAM KESULTANAN INDERAPURA	55
A. Dari Kerajaan Air Pura ke Kesultanan Inderapura.....	61
B. Pemerintahan dan Struktur Birokrasi.....	64
C. Distribusi Kekuasaan dan Mekanisme Suksesi Kepemimpinan	74

D. Konflik Internal.....	82
E. Kehidupan Keagamaan	92
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113

BAB I

PENDAHULUAN

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa kesultanan di Indonesia, baik kecil maupun besar, berperan penting terhadap penyebaran Islam di Nusantara dan perjuangan kemerdekaan, sekalipun mungkin dalam perjalanan sejarahnya berkolaborasi dengan kerajaan lainnya, baik untuk melawan penjajahan ataupun untuk mempertahankan eksistensi kesultananya sendiri. Pandangan penjajah yang kurang baik terhadap kesultanan Islam yang ada di Indonesia memberikan dampak negatif, karena kesultanan Islam dipandang mengancam eksistensi kekuasaan penjajah itu sendiri. Akibatnya gambaran kesultanan yang ada hanya dilihat dari sisi politik saja dan menutup peran kesultanan dalam mengembangkan ekonomi, pertanian, agama, sosial budaya dan lainnya. Inilah salah satu penyebab kenapa belum begitu banyak sejarah kesultanan nusantara ini yang bisa direkonstruksi keberadaannya.

Kesultanan Inderapura yang terletak di pantai barat Sumatera ini adalah salah satu di antara kesultanan yang pernah eksis di nusantara dan belum banyak diangkat ke permukaan. Padahal, jika dilihat secara makro banyak hal unik yang dapat ditelusuri di kesultanan ini. Beberapa di antaranya, *pertama*, dilihat dari sisi geografisnya, Inderapura merupakan wilayah strategis yang terletak di pesisir barat

pantai Sumatera (Sumatera Barat). Hasil buminya yang melimpah menjadi incaran berbagai kekuatan politik pada masanya. *Kedua*, bahwa dengan posisi geografis yang strategis dan hasil bumi yang berlimpah itu, Inderapura telah menjadi bagian dari korporasi jaringan koneksitas regional (Asia Tenggara) dan dunia internasional semenjak dahulu kala. *Ketiga*, keunikan juga terlihat dari sistem birokrasi, pembagian kekuasaan dan pola suksesi kepemimpinan. *Keempat*, dinamika dalam struktur birokrasi mendorong terjadinya pemekaran wilayah dalam pengertian positif dalam lingkungan kesultanan.

Kesultanan Inderapura merupakan sebuah kesultanan belum memperoleh porsi yang memadai dalam studi Sejarah Islam di Indonesia.¹ Padahal, dilihat dari sejarahnya, kesultanan ini telah memberikan sumbangan berharga bagi perjalanan sejarah Islam di daerah ini, dan memberikan warna tersendiri dalam percaturan politik Islam di nusantara pada masa lalu.

Penelitian dan penulisan sejarah kesultanan yang ada saat ini hanya didominasi oleh kesultanan-kesultanan yang 'dianggap besar' dan 'berjasa besar' dalam membangkitkan kesadaran akan eksistensi identitas kebangsaan dan keislaman

¹Pada umumnya gerakan heroik kerajaan dan kesultanan Islam di Indonesia, baik yang tergolong besar maupun lingkup kecil lebih banyak direkam oleh penulis-penulis kolonial Belanda. Apalagi tinggalan-tinggalan tertulis maupun bukti arkeologis sangat minim. Pada umumnya keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara hanya tersimpan dalam cerita-cerita rakyat (folklor) yang berbau mitos, sehingga untuk melacak keberadaannya sangat sulit. Kalaupun ada yang tertulis itupun dalam bentuk tambo, hikayat, kisah, babad, lontara, yang kebenaran historisnya perlu diuji dengan sangat intens karena berasal dari cerita dari mulut ke mulut (*oral transmission*).

di Nusantara. Beberapa diantaranya yang sudah banyak ditulis dan diteliti adalah Kesultanan (kerajaan) Samudera Pasai, Aceh Darussalam; Kerajaan Malaka; Kerajaan Riau Lingga; Kesultanan Palembang; Kesultanan Banten; Kesultanan Cirebon; Kesultanan Mataram; Kesultanan Demak; Kesultanan Goa; Kesultanan Ternate dan Tidore; dan sebagainya.²

Munculnya pemekaran wilayah bertujuan agar akses ke sumber-sumber ekonomi, terutama di daerah tertentu dapat dicapai dalam waktu singkat. Fenomena terakhir ini menjadi lebih penting artinya jika dikaitkan dengan maraknya kegiatan pemekaran wilayah di beberapa daerah di Indonesia. Tujuannya, agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik dan efisien serta pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam dapat terealisasi secara baik dan maksimal. Itulah faktor-faktor yang melatarbelakangi diangkatnya penelitian dan penulisan buku ini.

Kesultanan Inderapura adalah sebuah kesultanan yang tumbuh dan berkembang dengan lingkup yang sangat luas dan kompleks. Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tulisan ini berupaya merekonstruksi tentang *pertama*, bagaimana dinamika pemerintahan dan struktur birokrasi di Kesultanan Inderapura. *Kedua*, bagaimana sistem dan mekanisme suksesi

²Beberapa buku yang menguraikan tentang hal tersebut misalnya: Taufiq Abdullah (ed.), *Sejarah Umat Islam Indonesia*. (Jakarta: MUI, 1996); Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*. (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 6, 1990); R. Soekmoeno, *Sejarah Kebudayaan Indonesia III*. (Yogyakarta: Kanisius, 1984); dan lain-lain.

kepemimpinan dalam lingkungan Kesultanan Inderapura. *Ketiga*, bagaimana perkembangan kehidupan keagamaan pada masa Kesultanan Inderapura serta kedudukannya dalam dunia niaga regional dan internasional.

Ruang lingkup penelitian dan penulisan ini diarahkan kepada proses adaptasi Islam dalam perkembangan sistem dan perubahan struktur birokrasi kesultanan Inderapura dalam upaya memanfaatkan potensi alam yang dimiliki secara maksimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di samping itu, lingkup waktu difokuskan dan dibatasi pada apa yang terjadi pada abad XVI sampai awal abad XX M. Penetapan lingkup waktu ini berdasarkan pertimbangan bahwa pada waktu tersebut terjadi dinamika dan perubahan mendasar dalam sistem birokrasi kesultanan Inderapura.

Secara umum, buku ini berupaya mengungkap salah satu kerajaan/kesultanan Islam yang selama ini terabaikan, yakni Kesultanan Inderapura. Di samping itu, secara khusus penulisan ini bertujuan mendeskripsikan tentang dinamika sistem birokrasi dalam lingkungan kesultanan Inderapura pada abad XVI hingga awal abad XX dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk tujuan itu, penelitian dilakukan untuk melihat dan mendeskripsikan tentang dinamika pemerintahan dan struktur birokrasi, sistem dan mekanisme suksesi kepemimpinan, perkembangan kehidupan keagamaan, serta kedudukan Inderapura dalam percaturan perdagangan regional dan global.

Dengan demikian, tulisan ini diharapkan akan menemukan relevansi antara kenyataan sejarah yang pernah

terjadi masa lalu dengan dinamika sistem birokrasi yang berkembang saat ini, terutama dilihat dari gerakan pemekaran wilayah dan upaya mencari identitas genealogi keluarga, daerah dan masyarakat dalam arti luas. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan memberi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur lokalitas dan keagamaan yang terdapat dalam situs sejarah dan budaya di masa Kesultanan Inderapura.

Tinjauan pustaka³ juga perlu diangkat dalam penulisan ini, mengingat begitu strategis dan pentingnya kedudukan kesultanan Inderapura, baik dari sisi ekonomis maupun politis, beberapa kalangan akademisi telah melakukan penelitian dan kajian secara ilmiah namun dalam topik yang berbeda. Beberapa literatur yang terkait dengan ini dapat dikemukakan antara lain dari artikel yang ditulis oleh J. Kathirithamby-Wells, berjudul “The Inderapura Sultanate: The Foundations of Its Rise and Decline, from the Sixteenth to the Eighteenth Centuries”, yang dimuat dalam jurnal *Indonesia* edisi 21-April 1976.⁴ J. Kathirithamby-Wells, lebih banyak

³Tinjauan pustaka menjadi penting dalam suatu penelitian karena memiliki beberapa fungsi, yaitu: *pertama*, untuk memperoleh pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. *Kedua*, menegaskan kerangka teori yang akan dijadikan landasan pemikiran. *Ketiga*, memperdalam konsep-konsep yang dipergunakan dalam pembahasan suatu masalah.³ Di sisi lain, menurut Susanto Zuhdi, fungsi tinjauan pustaka mencakup dua hal, pertama, untuk mengetahui bagian-bagian mana dalam perbendaharaan pengetahuan yang belum terisi sehingga sebuah karya dapat menutupinya. Kedua, untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai kerangka teoritis dan metodologis. Lihat, Susanto Zuhdi, *Sejarah Buton yang Terabaikan; Labu Rope Labu Wana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 23-24.

⁴J. Kathirithamby-Wells, “The Inderapura Sultanate: The Foundations Of Its Rise And Decline, From The Sixteenth To The Eighteenth Centuries”, *Indonesia*, edisi 21-April 1976

berbicara tentang latar belakang sejarah tumbuh dan berkembangnya Kesultanan Inderapura pada abad ke-16, dan faktor penyebab keruntuhannya pada abad ke-18. Sementara perkembangan struktur birokrasi tidak banyak disinggung dalam tulisan ini.

Tulisan lain adalah sebuah novel sejarah karya Nur Sutan Iskandar yang berjudul *Hulubalang Raja: Kejadian di Pesisir Minangkabau Tahun 1662-1667*, diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1943.⁵ Novel ini lebih memberikan sentuhan tersendiri berkaitan dengan berbagai kejadian di lingkungan kerajaan karena dikemas dengan gaya roman, juga memiliki sentuhan sejarah yang dikatakan cukup baik, karena inspirasi tulisan ini diambil dari tulisan berjudul *De Westkust en Minangkabau (1667-1668)*, yaitu *academisch proefschrift* oleh H. Kroeskamp, yang dicetak oleh Drukkerij Fa. Schotanus & Jens di Utrecht dalam tahun 1931. Dengan gaya bahasa romantis, pengungkapan dinamika struktur birokrasi kesultanan menjadi bagian integral dalam buku ini, namun pemaparannya hanya secara ringkas.

Patut juga dijadikan rujukan tulisan Rusli Amran berjudul *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang* diterbit tahun 1981 oleh penerbit Sinar Harapan Jakarta⁶, dan *Sumatera Barat Plakat Panjang* terbit tahun 1985 oleh penerbit yang sama.⁷ Buku ini paling tidak telah memberikan ruang kepada peran

⁵Nur Sutan Iskandar, *Hulubalang Raja: Kejadian di Pesisir Minangkabau tahun 1662-1667*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1943)

⁶Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981)

⁷Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985)

Inderapura sebagai salah satu wilayah yang cukup diperhitungkan oleh Belanda, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi, yakni perdagangan lada dan emas di kawasan pantai barat Sumatera (Minangkabau). Buku ini juga belum begitu menyinggung persoalan dinamika birokrasi kesultanan

Hasil penelitian (disertasi) Gusti Asnan yang sudah diterbitkan jadi buku berjudul *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, diterbitkan oleh penerbit Ombak, Yogyakarta tahun 2007,⁸ adalah karya penting sebagai rujukan penelitian ini. Buku ini memuat tentang Inderapura sebagai salah satu pelabuhan penting di antara daerah lain di pesisir barat Sumatera seperti Barus, Air Bangis, Pariaman, Padang, dan Painan yang memainkan peran dalam perdagangan berbagai komoditi dengan Belanda dan Aceh. Secara umum, buku ini tidak membahas tentang dinamika birokrasi secara detail, kecuali dalam kaitannya dengan potensi alam yang dimiliki Inderapura.

Beberapa literatur terkait lain yang juga dijadikan rujukan, misalnya buku Yulizal Yunus, berjudul *Kesultanan Inderapura dan Mandeh Rubiyah di Lunang: Spirit Sejarah dari Kerajaan Bahari sampai Semangat Melayu Dunia*⁹. Buku ini lebih banyak memaparkan tentang kesultanan Inderapura sebagai kerajaan Melayu, yang memiliki jiwa petualangan bahari,

⁸Gusti Asnan, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007)

⁹Yulizal Yunus, *Kesultanan Indrapura dan Mandeh Rubiyah di Lunang; Spirit Sejarah dari Kerajaan Bahari Sampai Semangat Melayu Dunia*. (Padang: Pemda Kab. Pesisir Selatan – IAIN IB Press, 2002).

periodisasi kepemimpinan politik, dan hubungannya dengan Mandeh Rubiyah. Beberapa bagian buku ini telah memberi pengetahuan awal tentang pola dan sistem pemerintahan kesultanan Inderapura dan potensi alamnya, namun belum secara khusus membahas tentang dinamika sistem birokrasi.

Literatur-literatur tersebut merupakan sumber terpenting penelitian ini, yang memberikan informasi tentang segala aspek kehidupan Kesultanan Inderapura dengan berbagai dinamika di dalamnya. Ini juga akan memberikan jalan keluar di antara sekian banyak kesulitan yang ditemui dalam melacak keberadaan sumber-sumber yang cukup valid tentang Kesultanan Inderapura.

Pada dasarnya permasalahan yang menjadi penekanan dalam tulisan ini berkaitan dengan mekanisme, agensi, serta peran kekuasaan dan birokrasi dalam suatu tata pemerintahan kesultanan. Kekuasaan dan birokrasi adalah dua *term* yang saling berkaitan erat, karena ia masuk dalam lingkup yang sama. Dalam berbagai tulisan, para peneliti telah banyak mengangkat *term* kekuasaan dan birokrasi dalam kaitannya dengan sistem politik dan pemerintahan. Beberapa tulisan terkait memberikan pemahaman bahwa kekuasaan dan birokrasi di satu sisi dapat menguntungkan kehidupan masyarakat yang berada dalam lingkungannya, baik secara politik maupun ekonomi dapat memberi rasa aman kepada masyarakat. Namun di sisi lain, kekuasaan dan birokrasi tidak dijalankan sebagaimana idealnya. Akibatnya, hal itu tidak menguntungkan bahkan menyebabkan petaka bagi masyarakat.

Maxmillian Weber (Max Weber) dalam suatu analisisnya mengatakan bahwa birokrasi itu adalah sistem kekuasaan. Tempat para pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin.” Oleh sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal, karena tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional, karena dapat dipahami, dipelajari, dan gampang penjelasan sebab-akibatnya. Weber memperhatikan fenomena kontrol superordinat atas subordinat. Kontrol ini, jika tidak dilakukan pembatasan, berakibat pada akumulasi kekuatan absolut di tangan superordinat. Akibatnya, organisasi tidak lagi berjalan secara rasional, melainkan sesuai keinginan pemimpin belaka. Bagi Weber, perlu dilakukan pembatasan atas setiap kekuasaan yang ada di dalam birokrasi, yang meliputi dua hal. *Pertama*, kolegialitas, yaitu suatu prinsip pelibatan orang lain dalam pengambilan suatu keputusan. Dia mengakui bahwa dalam birokrasi, satu atasan mengambil satu keputusan sendiri. Namun, prinsip kolegialitas dapat saja diterapkan guna mencegah korupsi kekuasaan. *Kedua*, pemisahan kekuasaan, yaitu pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua badan atau lebih.

Sementara itu, menurut Dahrendorf kekuasaan merupakan otoritas yang dianggap sah. Kadangkala ada perspektif yang harus dikaji dalam proses kekuasaan ini. Pernyataan Ralf Dahrendorf:¹⁰ “otoritas adalah suatu tipe dari

¹⁰David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 209

hubungan sosial, ia terdapat dalam setiap organisasi sosial.... Otoritas adalah unsur yang universal dari struktur sosial..., adanya yang berkuasa dan yang dikuasai adalah hal yang biasa terdapat dalam setiap bentuk otoritas, juga dalam setiap tipe asosiasi dan organisasi”.

Bentuk dan sistem kekuasaan pada dasarnya selalu menyesuaikan diri dengan masyarakat, adat istiadat, dan pola-pola perilakunya. Kekuasaan itu dianggap perlu ada dalam masyarakat didasarkan pada kekhawatiran terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Bentuk integrasi dipertahankan oleh tata tertib sosial yang dianggap hanya bisa dijalankan oleh penguasa. Semakin banyaknya jumlah manusia, membuat orang mulai sadar bahwa keteraturan atau ketertiban masyarakat tidak bisa menggunakan pola kekuasaan di bawah satu tangan, akan tetapi harus ada pembagian kekuasaan. Kekuasaan bukanlah semata-mata berarti banyaknya orang tunduk di bawah seorang penguasa. Kekuasaan selalu berarti suatu sistem berlapis-lapis yang bertingkat (hierarkis).

Sistem birokrasi dan kekuasaan di Kesultanan Inderapura khususnya, memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan sistem birokrasi dan kekuasaan yang berlaku di Minangkabau maupun di kawasan lain di Nusantara. Setiap kekuasaan merupakan bagian dari otoritas. Sedangkan otoritas menurut Ralf Dahrendorf adalah pola penguasaan terhadap segala bentuk organisasi, baik formal maupun informal. Setiap fenomena kekuasaan akan menimbulkan arus distribusi kekuasaan yang begitu besar,

bahkan akan memunculkan arus pertukaran yang lebih besar apabila keduanya mencapai kesepakatan yang begitu kuat. Dalam hal ini, Dahrendrof lebih berhati-hati menekankan agar konsep tentang kekuasaan sebagai suatu bentuk hubungan tukar-menukar jangan dilihat sebagai pembenaran terhadap kekuasaan. Pertukaran tersebut bisa bersifat sangat timpang, sebagaimana dalam bidang ekonomi. Seseorang yang mempunyai kekuasaan monopoli atas distribusi komoditi penting dapat seenaknya menaikkan harga.¹¹

Dapat ditekankan kembali bahwa penulisan buku ini lebih menekankan aspek historis untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Untuk itu, metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Prosedur yang dilalui dalam penelitian sejarah mencakup 4 (empat) langkah, yakni heuristik, kritik sumber, analisis/interpretasi, serta historiografi.¹²

Heuristik berarti mengumpulkan sumber-sumber, sebagai langkah pertama yang harus dilalui dalam penelitian sejarah¹³. Sumber-sumber yang dikumpulkan dapat dikategorikan kepada dua macam. *Pertama*, sumber-sumber tertulis yakni menelusuri sumber di berbagai perpustakaan, mengumpulkan tulisan-tulisan, dan menemukan arsip-arsip

¹¹*Ibid.* hal. 207

¹²Prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian sejarah sebagaimana diuraikan berikut ini dapat dilihat dalam Lois Gottschalk, *Mengerti Sejarah*; terjemahan Nograho Noto Susanto, Jakarta UI-Press, 1988. hal. 33-34. Lihat juga misalnya, G.J. Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, terjemahan dari buku aslinya dengan judul *History Its Purpose and Methode*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 113-118 dan 176.

¹³Louis Gotschalk, *Ibid.*, hal. 33., G.J. Renier, *Ibid.*, hal 113.

serta naskah klasik terkait dengan topik penelitian. Di samping studi kepustakaan, beberapa sumber juga akan dikumpulkan melalui informasi yang diperoleh di museum, tulisan pada jurnal, koran maupun melalui internet. *Kedua*, sumber-sumber lisan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat yang mengetahui tentang peristiwa yang sedang diteliti. Wawancara diupayakan langsung ke generasi pewaris Kesultanan Inderapura.

Sumber-sumber yang sudah dikumpulkan dikategorikan kepada dua kelompok, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah naskah (manuskrip) Kesultanan Inderapura, yang saat ini disimpan oleh pewaris tahta kesultanan. Sedangkan sumber sekunder adalah tulisan-tulisan terkait dengan topik penelitian, baik dalam bentuk buku, majalah, koran dan informasi internet.

Kritik sumber dilakukan terhadap sumber dan rujukan yang telah diperoleh, baik melalui studi kepustakaan maupun informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait, tujuannya adalah untuk mendapatkan fakta. Prosedur kritik sumber dilakukan melalui dua langkah, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji kredibilitas sumber.¹⁴ Sedangkan kritik internal dilakukan untuk menguji otentisitas dan akurasi konten (isi) dari informasi yang telah diperoleh.¹⁵

¹⁴G.J. Renier, *Ibid.*, hal. 115.

¹⁵*Ibid.*, hal. 176.

Sedangkan sintesis/interpretasi adalah usaha dari sejarawan untuk menggabungkan fakta-fakta sejarah yang telah dipilih menurut hubungan kronologis dan sebab akibat (kausalitas).¹⁶ Pada tahapan ini, penulis akan melakukan interpretasi sumber agar diperoleh sumber yang urut waktu (kronologis), sehingga siap untuk disusun menjadi tulisan sejarah. Perhatian terbesar pada tahapan ini ialah proses pendekatan terhadap fakta-fakta sejarah yang sudah terkumpul, menyusun kerangka penulisan yang kritis, dan kemudian dianalisa sehingga siap untuk disusun menjadi sebuah tulisan sejarah yang ilmiah. Imajinasi sangat diperlukan dalam tahapan ini, namun imajinasi yang dipergunakan ialah imajinasi sejarah.

Selain itu, historiografi merupakan tahap terakhir dalam penulisan sejarah, ditujukan untuk menciptakan kembali totalitas peristiwa masa lampau yang sesungguhnya terjadi. Historiografi adalah upaya menyusun rangkaian fakta-fakta yang sudah disintesis dalam bentuk tulisan sejarah yang kritis-analitis. Melalui tahapan ini, penulis berharap dapat menyajikan suatu tulisan sejarah yang baik, ilmiah, dan memiliki nilai tambah sebagaimana yang diharapkan.

Secara ringkas, sistematika penulisan buku ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan. Intinya menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab kedua menjelaskan secara ringkas alam

¹⁶Louis Gotschalk, *Ibid.*, hal. 34

Inderapura. Berisi tentang posisi geografis dan potensi alam Inderapura, juga Inderapura sebagai sub-kultur Minangkabau. Bab ketiga mendeskripsikan tentang Inderapura dalam jaringan regional dan internasional. Tiga fokus pembahasan yang diangkat, yaitu: pantai barat Sumatera dalam perdagangan regional dan internasional; Inderapura sebagai salah satu *intraport* pantai barat Sumatera, dan perdagangan di Kesultanan Inderapura. Bab keempat mendeskripsikan tentang Islam dalam Kesultanan Inderapura. Topik uraiannya meliputi: dari Kerajaan Air Pura ke Kesultanan Inderapura; pemerintahan dan struktur birokrasi; distribusi kekuasaan dan mekanisme; suksesi kepemimpinan; konflik internal, dan; kehidupan keagamaan di Kesultanan Inderapura. Bab kelima sebagai penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

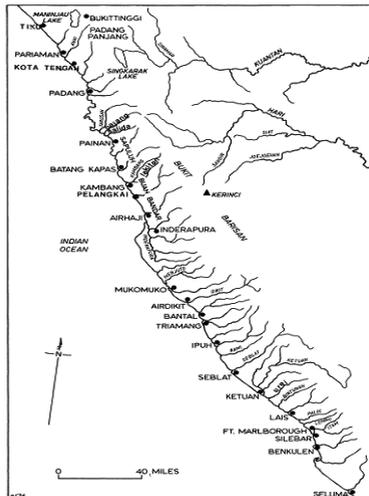
BAB II

ALAM INDERAPURA

A. Posisi Geografis dan Potensi Alam Inderapura

Paling tidak ada beberapa daerah di Sumatera yang memiliki nama Inderapura. Di Provinsi Riau sekarang terdapat pula nama Siak Sri Inderapura. Kesultanan Islam pernah eksis di sini. Sedangkan di Sumatera Utara, ditemukan daerah bernama Inderapura. Selain itu, di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ada juga nama daerah Inderapuri. Bahkan negeri Pahang di Malaysia dahulunya bernama Inderapura.

Inderapura yang dimaksud dalam buku ini adalah wilayah yang terletak di kesatuan administratif Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sekarang, sebagaimana terlihat pada peta berikut.



Peta kawasan yang mendapat pengaruh Kesultanan Inderapura

Secara umum posisi geografis Inderapura dapat dilihat dari beberapa periode perkembangan. *Pertama*, jika dilihat dari lingkup wilayah administratif sekarang, maka posisi geografisnya terletak dari utara ke selatan, yaitu $1^{\circ} 41' - 2^{\circ} 24'$ lintang selatan dan $100^{\circ} 51' - 101^{\circ} 17'$ bujur timur, sedangkan luas wilayah mencapai 740 km². Sebelah utara berbatas dengan Linggo Sari Baganti, sebelah selatan berbatas dengan Lunang Silaut, sebelah timur berbatas dengan Basa Ampek Balai-Tapan, dan sebelah barat berbatas dengan Samudera Indonesia. Dua sungai besar mengalir melewati wilayah ini hingga bermuara ke Samudera Indonesia, dan berfungsi sebagai jalur transportasi masyarakat pada masa dahulu bahkan hingga kini. Inderapura berada di dataran rendah dari topografi umum wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang berbukit-bukit. Wilayahnya terdiri dari dataran rendah dan lebih dekat ke pantai. Hal tersebut memungkinkan daerah ini tumbuh menjadi pelabuhan niaga, juga bandar dagang penting di kawasan pantai barat pada masa lalu.

Kedua, pada masa pemerintahan kesultanan, wilayah geografis Inderapura sangat luas, yaitu: bagian utara berbatasan dengan Sikilang Air Bangis-Batang Toru (Batak); bagian selatan berbatas dengan Taratak Air Hitam Muara Ketaun; bagian timur berbatas dengan Durian Ditakuk Rajo, *Nibuang Balantak Basi*, lingkaran Tanjung Simalindu (sepadan Jambi), dan; bagian barat berbatas dengan laut lepas, yang dikenal dengan *ombak nan badabua* (Samudera Indonesia).¹

¹*Manuskrip Inderapura*, selanjutnya di singkat MIP, hal. 228. Menurut sumber Barat di antaranya William Marsden pada masa jayanya wilayah kerajaan ini mencakup kawasan mulai dari Anak Sungai hingga Ketaun di Selatan. Lihat William

Perbatasan tersebut sekaligus menjadi wilayah administratif Kesultanan Inderapura. Bukti-bukti yang diperoleh dari sumber manuskrip Inderapura menyatakan bahwa daerah tersebut membayar “upeti” (pajak) kepada pemerintahan pusat di Inderapura.²

Ketiga, posisi geografis Inderapura pada masa VOC (kolonial Belanda) masuk dalam gugusan wilayah *Sumatra's Westkust* atau *de Westkust van Sumatera*.³ Pada masa itu, daerah di sepanjang pantai barat, sebagaimana disebut di atas yang semula masuk dalam kekuasaan Inderapura, secara bertahap dipersempit oleh Belanda. Satu demi satu daerah tersebut dilepaskan oleh Belanda dan Inggris dari ikatan administratif Inderapura. Puncaknya terjadi ketika jabatan sultan dihapus Belanda, dan diganti dengan jabatan “*regen*” sehingga wilayahnya semakin menyusut. Apalagi di bagian selatan, tepatnya di Muko-Muko yang pada masa kesultanan masuk wilayah administratif Inderapura, dilepaskan secara “paksa” oleh Inggris. Untuk menggantikan kedudukan sultan telah diangkat pula seorang *regen*. Semenjak itu, Inderapura masuk dalam *afdeling* Painan. Terakhir Inderapura merupakan bagian dari *afdeling* Balai Selasa.⁴

Marsden, *The History of Sumatera* (Reprint, the 3rd ed.) (Singapore, Oxford, New York: Oxford University Press, 1986), hal. 353.

²*Ibid*, hal.304, 331.

³Pengertian *Sumatra's Westkust* atau *de Westkust van Sumatra* adalah kesatuan wilayah kekuasaan ekonomi dan politik-administratif Belanda. Wilayah ini membentang 620 km dari Singkel di Utara hingga Inderapura di Selatan. Lihat dalam M.D. Mansoer, et al, *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara, 1970, hal. 1. Gusti Asnan, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Jogjakarta: Ombak, 2007, hal. 21.

⁴Lihat Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan, 1982. hal. 234.

Selain memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan di pantai barat Sumatera, Inderapura juga memiliki potensi alam yang beragam, di antaranya komoditi yang menjadi primadona pada masa lalu seperti lada hitam⁵. Di samping itu ada juga kopi.⁶ Daerah yang menjadi basis penanaman dan produksi lada adalah daerah-daerah di selatan Inderapura hingga Silebar (sekarang di Provinsi Bengkulu). Berdasarkan laporan Belanda, pada tahun 1616 Inderapura digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang makmur di bawah pemerintahan Raja Itam. Sekitar 30.000 rakyatnya terlibat dalam pertanian dan perkebunan yang mengandalkan komoditi beras dan lada.⁷

Tanah di sekitar Indrapura dan lingkungan alam di sekitar kerajaan itu juga cocok untuk budidaya lada. Menurut Kroeskamp, budidaya tanaman yang sangat laku pada abad ke-16 hingga ke-18 ini telah dikenal penduduk pantai barat Sumatera, termasuk Inderapura pada kurun waktu sebelum kedatangan orang Eropa. Kualitas lada di daerah ini tergolong baik dan sangat baik.⁸

Pada abad ke-16 dan awal abad ke-18, penduduk Inderapura mengusahakan penanaman lada dengan pola budidaya yang sudah maju. Mereka memiliki kemampuan

⁵*Naskah MIP*, hal.246(ditransliterasi oleh Muhapril Musri)

⁶*Naskah MIP*, hal. 245(ditransliterasi oleh Muhapril Musri)

⁷Kathirithamby-Wells, J. "The Inderapura Sultanate: The Foundation of its Rise and Decline, from the Sixteenth to the Eighteenth Century". *Indonesia* 21: 1976, hal. 65-84.

⁸Hendrik, Kroeskamp, *De Westkust en Minangkabau* (Utrecht: Fa. Schotanus & Jens, 1931), hal. 11; *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* (2de Deel), 's-Gravenhage, Leiden: Martinus Nijhoof, E.J. Brill, 1918, hal. 152.

menanam lada dengan sangat baik, dan juga merawat tumbuhan ini dengan sangat telaten. Penanaman yang baik dan perawatan yang telaten menghasilkan biji-biji lada yang berkualitas. Sehingga disebutkan bahwa lada keluaran Inderapura sangat disukai para pembeli China atau Eropa.

Lada hitam (merica) adalah komoditi yang paling dicari oleh berbagai kekuatan politik pada rentang waktu abad ke 17 dan 18. Khusus untuk kasus Inderapura, sebagai salah satu daerah penghasil komoditi lada di kawasan pantai barat Sumatera, kekuatan politik regional dan internasional yang pernah menjalin kontak dagang komoditi lada dengan kesultanan ini adalah Kesultanan Banten, Kesultanan Aceh Darussalam, kolonial Belanda (VOC), dan Inggris.

Bukan hanya itu, untuk dapat menguasai perdagangan hasil bumi jenis ini, tidak jarang terjadi kriminalitas dan politik kekerasan. Karena begitu pentingnya komoditi yang satu ini, hampir sebagian besar wilayah Nusantara membuka lahan perkebunan lada untuk kepentingan perdagangan dengan bangsa Eropa. Komoditi lada ini pula yang menjadikan Inderapura tumbuh sebagai kesultanan yang disegani oleh berbagai suku bangsa. Dalam bahasa yang agak lugas dikatakan bahwa perkembangan, kemajuan, dan ekspansi Inderapura ditunjang terutama oleh komoditi lada, juga penerapan aturan *pelabuhan bebas cukai* dalam mendorong perekonomiannya.⁹ Komoditi lada pula yang akhirnya menyebabkan Inderapura hancur sebagai kesultanan besar dalam sejarah.

⁹*Ibid.*

Selain komoditi lada, potensi wilayah Inderapura lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah emas. Beberapa sumber Belanda menyebutkan bahwa di samping kaya akan komoditas lada, Inderapura juga memiliki cadangan emas. Emas yang dihasilkan negeri ini didapat dari proses pendulangan yang dilakukan penduduk di kawasan aliran sungai yang ada. Emas sebagai komoditas perdagangan Inderapura juga didapat dari proses penambangan yang dilakukan di daerah pedalaman (termasuk daerah Kerinci). Lada ditanam di wilayah kerajaan Inderapura. Di samping itu, lada yang pernah menjadi komoditas niaga andalan mereka juga didatangkan dari berbagai daerah di sekitarnya. Dengan kata lain, Inderapura menjadi *stapelplaats* (pusat pengumpulan) bagi komoditas ini sebelum dijual ke 'pasar'.

Menurut Verbeek, tanah yang berada di kawasan sekitar Indrapura memang mengandung cadangan emas. Potensi tersebut sesungguhnya juga terdapat pada hampir semua kawasan pantai di selatan Kota Padang, namun kandungan yang relatif banyak terdapat di daerah sekitar Inderapura dan Kerinci serta Salido (dekat Painan).¹⁰ Walaupun demikian, Verbeek juga menambahkan bahwa jumlah kandungan emas itu tidak begitu banyak, sehingga tidak menguntungkan bila dieksploitasi dengan skala besar. Apa yang dikemukakan Verbeek ini dapat dilihat dari pengalaman VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Kompeni dagang dan pemerintahan pewarisnya itu pernah membuka

¹⁰Cadangan emas ini sesungguhnya juga terdapat di kawasan Bengkulu dan sekitarnya. Lihat juga Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hal. 222-28).

tambang emas di Salido dan sekitarnya, namun keuntungan yang didapat sangat sedikit jika dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan.¹¹

Sementara sumber-sumber lokal juga menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah yang masuk dalam administratif Inderapura, terutama di bagian Timur dan Selatan memiliki cadangan emas yang berlimpah. Keterangan tentang cadangan emas yang dimiliki Kesultanan Inderapura dapat dibaca dalam naskah manuskrip Inderapura sebagai berikut:¹²

Halaman: 255...(naskah MIP)

Alkisah maka tersebutlah Sutan Gondam dan Sutan Saidi dititahkan oleh Tuanku Sultan Muhammad Syah Regent yang pengabisan di Indrapura.

Setelah selesai perang Kurinci maka Tuanku Sultan Muhammad Syah beristirahat di dusun Rawang, maka datang Datuk dari Pangkalan Jambu bergelar Datuk Bandaro Kayo *Ilyas Haji Mayang(?)*. Maka disuruh kumbali ke Pangkalan Jambu bersama2 Sutan Gondam dan Sutan Saidi pergi melihat tambang2 di situ. Maka sampai mereka itu beristirahat di kampung *Birun(?)* di rumah tua di situ. Maka diperbuatlah surat perjanjian seperti ini :

Pangkalan Jambu, 27 Juli 1903

¹¹*Ibid*, hal. 224-28; M. Joustra, *Minangkabau: Overzicht van Land, Geschiedenis en Volk* (Leiden: Drukkerij Louis H. Becherer, 1923), hal. 223-25.

¹²*Naskah MIP* nomor halaman tersebut ditransliterasi oleh Irhash A. Shamad.

Bahwa kami Datuk Nan Berempat buah perut serta Manti nan Bertiga di dalam lurah Pangkalan Jambu wilayah atau Jambu Depati Muara *Langkab(?)* [...] bertanda tangan di bawah ini dengan [...] dan ikhlas serta yakin memegang hak dan milik jikalau tambang emas pusaka dari orang tua kami yang turun temurun yang berasal dari Sultan Indrapura.

Pada waktu ini kami serahkan kembali segala tambang emas itu kepada Tuanku.....

Halaman : 254 ... (naskah MIP)

Regent sehingga sampai kepada ahli warisnya di Indrapura, buruk baik, maka berkuasalah Tuanku Regent dan ahli warisnya di atas tambang emas itu, tetapi sekali2 Tuanku Regent atau ahli warisnya tidak boleh menjual *banji(?)* atau *kuluk(?)* gadai karena itu akan jadi pintu penghidupan antara Tuanku Regent serta ahli warisnya dengan kami serta ahli waris kami.

Dan sekali2 kami Datuk Nan berempat serta Manti Nan Bertiga sampai kepada ahli waris kami tidak boleh memungkirkan peraturan Tuanku Regent di atas hal segala tambang2 emas itu melainkan apa saja kata Tuanku Regent atas jalan atas jalan kebaikan kamipun menurut karena Tuanku Regent yang menanggung buruk baik kami sebab menurut imanah orang tua2 yang dahulukala dari awal sampai kepada akhirnya tiadalah boleh *bercuai(?)*.

Demikianlah perbuatan ini [...] bertandatangan di akhir ini surat diperbuat duo serupa:

1 helai terpegang pada Datuk Nan Berempat

1 helai terpegang pada Tuanku Regent

Halaman: 253...(naskah MIP)

Yang melihat bertandatangan:

1. Sutan Gondam

2. Sutan Saidi

Sambil keduanya turut bertandatangan di atas itu perjanjian

3. Haji Muhammad Saman

4. Dipati Muara Langkap

5. Haji Abdul Kadir

6. Muhammad Yusuf

7. Abu Yadib

Tanda tangan kami Datuk Nan berempat Manti nan Bertiga:

1. Penghulu Kayo (Muhammad Nuh)

2. Datuk Bandaro Kayo (Shaleh)

3. Datuk Rajo Bintan (*Tinyo'*)(?)

4. Datuk Penghulu Muda (Rajab)

5. Rinyo Gusala (Samangun)

6. Rinyo Raja Minang (Tang Gadih)

7. Rinyo Niti (Tiang Raja)
8. Rinyo Caya Nagaro
9. Rinyo Sutan Panghulu (Umar)
10. Rinyo Sutan Dupati
11. Datuk Bandaro Sutan (Saring)
12. Raja Malintang (Badu Ameh)
13. Sutan Mudo (Citam)

Halaman: 252 ... (naskah MIP)

Sesudah surat diperbuat disuruh Dipati Muara langkab mencari tambang emas dapat 11 tempat:

1. Tambang dalam Sungai Liki
2. Tambang dalam Sungai Aur
3. Tambang dalam Sungai Sapura² (Barung Pulau)
4. Tambang dalam *Pantaian* (?)
5. Tambang dalam *Langasih* (?)
6. Tambang dalam Sungai Batu
7. Tambang dalam Air Bahan
8. Tambang dalam Sungai Pinang
9. Tambang dalam Sungai Sangayo
10. Tambang dalam Sungai Simujur
11. Tambang dalam Batang Birun

12. *Tambang dalam Air Salai di Terutung Duanai Bandaro Langit* [ini dicatatkan kemudian dengan tulisan dan tinta yang berbeda, pen.]

Halaman: 251... (naskah MIP)

Syahdan tatkalan Sultan Malafar Alam Syah kerajaan di Indrapura bermakam almarhum ini di Silau maka Sri Sultan pergi menjalani jajahan sampai ke Urai maka tatkala itu Sultan suruh seorang hulubalang bernama Raja Berkilat serta empat orang pengiringnya pergi mencari tambang2 emas di hulu Silaut karna Sultan telah melihat dan memeriksa tambang2 emas di sebelah ke Urai dan hulu Ketahun, maka setelah kembali mereka itu lalu mempersembahkan bahaso [bahwa, pen,] mereka itu tidak tahu apa rupanya gunung berisi emas, tetapi kami ada membawa batu2 yang indah yang menyerupai dalam batu2 itu emas – batu yang dibawa mereka itu *sekumpai(?)* banyaknya.

Maka Sultan pun juga tidak tahu rupanya batu2 emas itu maka Sultan suruh seorang hulubalang lagi pergi ke tambang Air Bendung di Lebung Hulu Ketahun. Namanya hulubalang itu Pak Rupit sebab berasal dari orang Rupit Hulu Palembang tinggal di Indrapura menjadi hulubalang, maka Pak Rupit pergi menurut penitahan rajanya maka terbawalah olehnya contoh batu emas itu lalu dipersembahkan kepada Sultan maka betul serupa benar dengan batu dari tambang Air Bendung itu. Maka Sultan menitah hulubalang yang bernama Raja Berkilat.

Halaman: 250.... (naskah MIP)

bersama keduanya mengulang mengitari itu tambang² dan memastikan tempatnya.

Maka setelah kembali Raja berkilat dari memeriksa pendapatannya itu maka dipersembahkanlah kepada Sultan bahaso [bahwa, pen.] sudah diberi tanda yaitu ditanam tiga batang kayu pasak dan tempatnya di Air Simpang Tiga Hulu Silaut dekat ke Ranah Manjuto.

Maka Sultan kembali ke Indrapura, setahun di belakang itu maka Sultan Kumisi lagi ke Urai sambil menerima upeti dan kembali ke Silaut hendak membuka itu tambang karena Sultan memperhatikan sungguh bagaimana caranya orang² Rejang itu membuka tambang.

Setelah sampai di Silaut maka Sultan dapat sakit raja namanya seperti tersebut dalam tambo ini. Maka segala penghulu² yaitu Datuk² hendak membawa beliau kembali ke Indrapura tetapi beliau tidak suka karena maksud beliau apabila beliau sudah sembuh beliau hendak membuka itu tambang segala perkakasnya beliau beliau sudah bawa dari Ketahun dan orang yang pandai menambang itu beliau telah bawa juga empat orang

1. Namanya Sigagih

Halaman: 249 [tertulis nomor halaman 259]

2. Namanya Tamban Ayam
3. Pak Janang
4. Ali Koto

Sakit Sultan bertambah keras maka Sultan berpulang kerahmatullah maka bermakam di Silaut sekarang dinamakan Gobah Silaut.

Kerajaan diganti oleh Sultan Inayat Syah yaitu Sultan yang [...] Sultan ini berkubur di Pelokan Mudik, maka kerja tambang itu beliau usahakan dengan pertolongan orang2 yang berempat tadi, maka ada tidaknya memberi hasil tidak disebut dalam sejarah ini

Keterangan naskah tersebut di atas memberi gambaran bahwa bumi Inderapura ternyata memiliki kandungan dan cadangan emas yang cukup besar. Seluruh cadangan emas yang terdapat di berbagai tempat dikelola di bawah kendali Kesultanan Inderapura. Kesultanan memiliki tenaga ahli yang sangat mumpuni, khususnya pada masa itu untuk melihat potensi kandungan emas yang ada di suatu daerah Tenaga ahli tersebut memiliki cara tersendiri dalam menentukan daerah-daerah mana saja yang memiliki kandungan emas.

Potensi alam yang juga sangat penting artinya dalam perkembangan ekonomi Kesultanan Inderapura terdapat di dua sungai besar yang mengalir dan bermuara ke Samudera Indonesia, yaitu sungai (batang) Inderapura dan sungai (batang) Muaro Sakai. Selain kedua sungai besar tersebut, masih banyak lagi sungai dengan tipe kecil.¹³ Sungai-sungai tersebut berperan besar dalam mendukung perekonomian masyarakat Inderapura dari masa dahulu hingga kini, baik sebagai jalur transportasi umum maupun sebagai jalur perdagangan antar kota-kota pantai.

¹³Catatan yang agak lengkap tentang sungai-sungai yang ada di Inderapura dapat dilihat dalam Yulizal Yunus, et al., *Kesultanan Inderapura...op.cit.*, hal.18-20.

Ketika kolonial Belanda menjalin hubungan dagang dengan Inderapura, di Sungai Muaro Sakai dibangun sebuah pelabuhan maritime, yang dilengkapi dengan bangunan hanggar bongkar muat berbagai komoditi hasil bumi Inderapura. Jarak pelabuhan Muaro Sakai dengan Samudera Hindia lebih kurang 7 km ke arah pedalaman.¹⁴ Di samping hanggar bongkar muat, Belanda juga membangun sebuah gudang penyimpanan garam yang berasal dari Jawa sebagai alat barter dengan masyarakat yang memiliki komoditi lada dan kopi. Bangunan tersebut hingga kini masih eksis, namun tidak terawat dengan baik sebagai sebuah benda cagar budaya. Bangunan itu saat ini dimanfaatkan dan dialihfungsikan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan perekonomian.

B. Inderapura Sebagai Subkultur Minangkabau

Perdebatan klasik tentang apakah nenek moyang Minangkabau, yaitu yang mendarat dari laut kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah pedalaman (*darek*) berasal dari Inderapura, atau dari pedalaman turun ke Inderapura (*pesisir*), sebagaimana cerita yang berkembang dalam masyarakat. Hingga saat ini perdebatan tersebut belum mencapai titik temunya. Namun yang jelas bahwa Inderapura

¹⁴Ada beberapa alasan kenapa pelabuhan Inderapura tidak berada di pinggir pantai. *Pertama*, lautan yang membentang di bagian barat Inderapura adalah lautan lepas tanpa ada pulau yang berfungsi sebagai “pengaman” dari terjangan ombak besar. *Kedua*, menghindarkan resiko terjangan tsunami yang sewaktu-waktu dapat terjadi secara sporadis. *Ketiga*, alasan keamanan dari para perompak dan bajak laut.

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kultur Minangkabau.

Sebagai bagian dari kultur Minangkabau, sistem adat yang berlaku di Inderapura dan sekitarnya terkenal dengan falsafah, “*adat di tanah tigo lurah nagari nan ampek jurai; Silaut nagari tuo, Lunang Bumi Keramat, Tapan basa ampek balai, Indopuro rajo berdaulat. Di Lunang rajo batin, di Tapan rajo adat, dan di Indopuro rajo syara*”.¹⁵ Falsafah ini menunjukkan bahwa sistem dan tradisi hidup yang berlaku dalam masyarakat berhubungan erat dengan adat dan tradisi budaya Minangkabau. Walaupun di beberapa sisi terdapat perbedaan, namun hal itu lebih menunjukkan kepada bentuk “*adat salingka nagari*”.

Dari segi posisi geografis, batasan wilayah Inderapura ternyata juga merupakan batas wilayah Minangkabau, seperti tercermin dalam berbagai ungkapan tambo Minangkabau dan naskah klasik Indrapura, yakni “*dari sikilang aia bangih sampai ka taratak aia itam, dari sipisok-pisok pisau anyuik sampai ka sialang balantak basi, dari riak nan badabuah sampai ka durian ditakuak rajo*”.¹⁶ Dengan demikian, keyakinan akan kesamaan wilayah geografis berkembang pula kepada kesamaan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.

Kedudukan Inderapura sebagai subkultur dari alam Minangkabau, paling tidak terlihat dari dua hal. *Pertama,*

¹⁵Hatta Latif, “Menyingkap Tabir Mande Rubiah Lunang Silaut – Pesisir Selatan”, *naskah* tidak diterbitkan.

¹⁶*Naskah MIP*, hal. 228. Baca juga A.A. Navis, *Alam Terkambang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Grafitipers, cet. ke-2, 1986, hal. 53-54.

dilihat dari stratifikasi masyarakatnya, Inderapura merupakan bagian yang tak terpisahkan dari stratifikasi masyarakat adat Minangkabau. Dalam hidup kesehariannya, masyarakat Inderapura hidup secara berkelompok menurut suku. Masing-masing suku dikepalai oleh seorang kepala suku yang bergelar *Rang Kayo*. Dalam setiap suku mereka mengelompokan diri pula sesuai dengan jalur garis kekerabatan. Stratifikasi sosial masyarakat Inderapura menurut informasi *naskah manuskrip Inderapura (MIP)*, dibagi dalam tiga kelompok, yaitu enam penghulu di Hulu, kelompok suku Panai, dan Sikumbang. Ikon khususnya kain *ikek* (destar) berwarna merah berarti membangun nagari, juga menjaga stabilitas keamanan dari segala macam gangguan dan ancaman, terutama yang datang dari gunung sekali pun, yang akan menyebabkan tertumpahnya darah ke bumi.

Enam penghulu di Hilir terdiri dari kelompok suku Caniago, memakai ikon kebanggaan kain *ikek* warna hitam, yang berarti sekali pun mengepul asap kapal perang di laut untuk menyerang nagari, namun adat istiadat dan anak kemenakan tetap dipertahankan. Sedangkan delapan penghulu terdapat di tengah kelompok suku Malayu. Ikon kebanggaan mereka adalah kain *ikek* warna kuning. Artinya, kelompok inilah yang akan mencari jalan penyelesaian terhadap segala pertikaian yang terjadi antara anak kemenakan. Jumlah mereka terdiri dari dua puluh penghulu, yang disebut juga dengan "*Menteri nan Duo Puluah*".¹⁷

¹⁷*Naskah MIP*, hal. 212 (ditransliterasi oleh Khilal Syauqi), dan hal. 324, 326 (ditransliterasi oleh Irhash A. Shamad). Lihat juga Yulizal Yunus, et al, *Kesultanan*

Kedua, dilihat dari struktur pemerintahan, Kesultanan Inderapura menerapkan pola dan sistem kepemimpinan adat Minangkabau. Raja atau sultan merupakan pimpinan politik tertinggi. Di samping sebagai administrator politik, dia juga bertugas mengatur pelaksanaan sistem adat-istiadat nagari, dan sebagai pemutus akhir setiap persoalan adat yang muncul ke permukaan.¹⁸ Kaum raja atau sultan dan kaum penghulu yang dua puluh berkewajiban memegang teguh aturan-aturan adat yang sudah disepakati bersama. Seluruhnya sama-sama memikul tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup nagari.

Selain dari itu, di Inderapura khususnya dan di daerah pesisir umumnya memakai sistem adat *Koto Piliang (Datuak Katumangguangan)*. Artinya, pucuk adat yang paling tinggi adalah *rajo* (raja atau sultan).¹⁹ Jika dalam mufakat antar suku dan penghulu tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan adat, maka *rajo* akan memberikan keputusan akhir yang akan ditaati oleh semua elemen adat yang ada di Inderapura.²⁰

Inderapura...ibid. hal. 152. Baca juga Amran Isa, "Peranan Adat Dalam Pembangunan Nagari Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat", *Makalah* disampaikan pada Musyawarah Pembangunan Nagari Inderapura (Musbang) II, tanggal 12 Sept ember 1993., hal. 13-14.

¹⁸*Naskah MIP*, hal. 228 (ditransliterasi oleh Muhapril Musri).

¹⁹A.A. Navis, *op.cit.* hal. 55.

²⁰Amran Isa, *op.cit.* hal. 9



BAB III

INDERAPURA DALAM JARINGAN PERDAGANGAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL

A. Pantai Barat Sumatera dalam Perdagangan Regional dan Internasional

Ada tiga jaringan perdagangan yang pernah ada di kawasan barat Sumatera. *Pertama*, jaringan perdagangan antar-sesama kota bandar di pesisir barat Sumatera. *Kedua*, jaringan perdagangan antara kota bandar di pesisir barat Sumatera dengan daerah-daerah di pedalaman (*hinterlands*). *Ketiga*, jaringan perdagangan antara kota bandar di pesisir barat Sumatera dengan dunia luar.¹

Literatur dan catatan sejarah yang ada ternyata lebih banyak menginformasikan tentang jaringan perdagangan antara kota bandar di pesisir barat Sumatera dengan dunia luar.² Aktivitas ini bahkan disebut-sebut telah berlangsung sejak paruh kedua milenium pertama, atau bahkan lebih tua dari itu. Saudagar Arab dan India dikatakan sebagai saudagar asing pertama yang menjalin kontak niaga dengan kawasan barat Sumatera. Kapur barus dan kemeyan adalah dua

¹Gusti Asnan, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera* (Yogyakarta: Ombak, 2006), hal. 143-88.

²Dunia luar yang dimaksud di sini adalah kawasan/daerah budaya Minangkabau (di mana Indrapuramerupakan bagiannya), atau kawasan/daerah lain yang berada di luar Pulau Sumatera. Lihat juga Hendrik Kroeskamp, *op.cit.*, hal. 9-12.

komoditas perdagangan yang paling awal dijual dari kawasan ini.³

Aktivitas pelayaran dan perniagaan antara kawasan barat Sumatera dengan India atau Arab, memang sangat dimungkinkan terjadi semenjak awal sejarah Islam. Aktivitas itu bisa terjadi karena negeri-negeri tersebut sama-sama terletak di kawasan perairan Samudera Hindia. Sistem/arah angin dan pola arus lautnya memudahkan pergerakan saudagar yang menggunakan kapal laut. Para saudagar Arab atau India lebih awal mendatangi kawasan barat Sumatera. Sebab, kapur barus dan kemeyan merupakan dua produk yang sangat penting dalam berbagai ritual kepercayaan dan kehidupan sehari-hari bangsa Arab dan India. Kedua komoditas tersebut memiliki nilai yang tinggi di kedua kawasan itu. Para saudagar sangat tertarik dengan 'barang' tersebut karena keuntungan yang didapat juga sangat tinggi.

Memasuki paruh kedua milenium kedua, para pelaut dan saudagar India mulai mendominasi perdagangan antara pantai barat dengan dunia luar. Pada kurun waktu itu, persisnya pada abad ke-15 dan awal abad ke-16, kapal-kapal dari India dengan rutin mendatangi kawasan barat Sumatera. Kapal dan pelaut serta saudagar India datang untuk membeli sejumlah komoditas niaga yang dihasilkan daerah ini, sekaligus menjual berbagai produk yang dibutuhkan di pantai barat Sumatera. Menurut Tome Pires, ada tiga kota bandar yang rutin dikunjungi orang atau saudagar India pada awal abad ke-16, yakni Barus, Tiku, dan Pariaman. Hasil alam

³Hendrik Kroeskamp, *op.cit.*, hal. 9

Sumatera yang sangat dicari saudagar India waktu itu antara lain emas, kayu gaharu, sutera, lilin, dan madu. Emas bahkan dikatakan tersedia dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, para saudagar India juga punya kepentingan mengimpor produk pakaian.⁴

Aktivitas niaga pantai barat Sumatera tidak hanya berkembang ke arah utara (dengan India dan Arab), terutama pada kurun waktu sebelum kedatangan orang Eropa. Kawasan barat Sumatera juga menjalin kontak dagang ke arah selatan, yaitu Pulau Jawa umumnya dan Tanah Sunda pada khususnya. Kapal/perahu dari pantai barat Sumatera telah berlayar ke Pulau Jawa (Tanah Sunda). Sebaliknya, kapal/perahu dari Pulau Jawa (Tanah Sunda) juga mendatangi pantai barat Sumatera. Aktivitas niaga antara kedua daerah juga telah terjalin sejak waktu yang lama. Komoditas niaga yang diperdagangkan dari pantai barat Sumatera ke Jawa/Tanah Sunda waktu itu antara lain emas dan juga kuda.⁵

Melihat komoditas perdagangan yang disebut terakhir, bisa dikatakan bahwa perdagangan pada masa sebelum kedatangan orang Eropa ini telah berlangsung dalam skala besar, yaitu sebuah kegiatan perdagangan yang disebut sebagai *bulk trade* oleh M.A.P. Meilink-Roelofs. Dalam sistem perdagangan seperti ini, telah dipergunakan kapal dalam ukuran besar. Barang dagangan yang dibawa juga dalam jumlah yang banyak. Tidak mungkin perdagangan kuda

⁴Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tome Pires* (London: Haklyut Society, 1944), hal. 160-161.

⁵*Ibid*, hal. 161. Lihat juga Cristine Dobbin, *Islamic Revivalisme in a Changing Peasant Economy, Central Sumatra, 1784-1847* (Malmo: Curzon Press, 1983, hal. 71-72.

dilakukan dengan menggunakan kapal kecil, sebab tidak mungkin kuda yang dibawa hanya berjumlah satu atau dua ekor. Kawasan barat Sumatera masa itu telah terlibat dalam perdagangan skala besar ini.⁶

Ketika Aceh tumbuh menjadi pusat politik dan ekonomi terpenting di bagian utara Sumatera khususnya dan pesisir barat Sumatera pada umumnya, Aceh menjadi dunia “luar” yang ikut mewarnai kegiatan perniagaan di kawasan barat Sumatera.⁷ Pada masa ini, aktivitas perdagangan mulai beralih menuju dan terpusat di Kutaraja (ibukota Kerajaan Aceh). Sentralisasi dan monopoli perdagangan mulai hadir dalam sistem perdagangan pantai barat Sumatera.⁸ Semua komoditas perdagangan yang dihasilkan pantai barat Sumatera (daerah yang telah menjadi taklukan/jajahan Aceh) harus dibawa ke Kotaraja. Di kota itulah berbagai produk perdagangan dijual kepada para pembeli.⁹

Pola perdagangan dengan sistem sentralisasi dan monopoli ini kemudian diwarisi oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Setelah tumbuh dan berhasil

⁶M.A.P. Meilink-Roelofs, *Asia Trade and European Influence in the Indonesia Archipelago between 1500 and about 1630* (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962), hal. 92-93.

⁷Rusli Amran bahkan menyebut penguasaan Aceh atas pantai barat sebagai sebuah benuk penjajahan/ Lihat Rusli Amran, *op.cit.*, hal. 110ff.

⁸Praktik sentralisasi dan monopoli perdagangan di kawasan Nusantara sesungguhnya diperkenalkan oleh Portugis segera setelah mereka menguasai Malaka. Lihat Hendrik Kroeskamp, *op.cit.*, hal. 9.

⁹J. Kathirithamby-Wells, “The Indrapura Sultane: The Foundations of Its Rise and Decline, from the Sixteenth to the Eighteenth Century” dalam *Indonesia*, No. 21 (April 1976). Lihat juga J. Kathirithamby-Wells, “Acehnese Control over West Coast of Sumatra up to the Treaty of the Painan 1663” dalam *Journal of Southeast Asia History*, X, 1969, hal. 453-479; Rusli Amran, *op.cit.*, hal. 111.

mencengkeramkan kukunya di sebagian besar kawasan barat Sumatera, terutama sejak paruh kedua abad ke-17 hingga penghujung abad ke-18, kompeni dagang ini menjadikan Pulau Cingkuak dan terakhir Kota Padang sebagai pusat pengumpulan berbagai komoditas niaga yang dihasilkan. Dari kedua daerah inilah berbagai komoditas niaga tersebut dijual kepada pembeli atau dibawa ke luar negeri.¹⁰

Pemerintah Hindia Belanda yang mewarisi VOC juga melanjutkan sentralisasi dan monopoli kegiatan perdagangan. Padang tetap menjadi pusat kegiatan perdagangan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tidak itu saja, Padang bahkan menjadi pusat kegiatan perkapalan dan pelayaran di bagian barat Sumatera. Pelabuhan laut yang terbesar dan terlengkap dibangun di kota ini. Pelabuhan tersebut disinggahi oleh kapal-kapal (Belanda) dalam pelayaran mereka dari dan ke negeri Belanda.

Di samping perdagangan dengan luar negeri, juga berkembang perdagangan antara kota pantai di pesisir barat Sumatera dengan kawasan yang berada di pedalaman.¹¹ Kegiatan niaga di Kota Barus dan Singkel umpunya berkembang dengan pesat karena adanya hubungan dagang dengan kawasan Batak pedalaman. Para pengumpul atau saudagar Batak dari daerah pedalamanlah yang

¹⁰Praktik yang sama sesungguhnya juga dilakukan oleh EIC (*East Indian Company*) yang menguasai kawasan selatan Sumatera. EIC memonopoli kegiatan niaga di bagian selatan Sumatera dan menjadikan Bengkulu sebagai pusat niaga (sekaligus) aktivitas politiknya.

¹¹Untuk pembahasan yang lebih lengkap mengenai jaringan perdagangan antara kota pantai dengan daerah pedalaman ini lihat Gusti Asnan, *op.cit.*, hal. 143-151.

sesungguhnya menyuplai berbagai komoditas niaga yang diperdagangkan di kedua kota bandar itu. Kapur barus dan kemeyan yang menjadi primadona perdagangan di kawasan itu didatangkan dari daerah pedalaman tersebut. Guta percha yang kemudian menjadi unggulan perdagangan di kedua kota bandar itu juga didatangkan dari daerah *hinterland*-nya.

Sungai, terutama sungai Singkel (yang di hulunya terdiri dari sungai Simpang Kiri dan Sipang Kanan) serta Aek Batu Grigis (yang di hulunya terdiri dari Aek Arion dan Aek Sirahar), memegang peranan penting dalam jalinan perdagangan antara kota bandar Singkel dan kota bandar Barus dengan daerah pedalamannya. Melalui sungai-sungai itulah para pengumpul dan saudagar dari daerah pedalaman datang membawa barang dagangan ke kota bandar di kawasan pesisir tersebut. Kebetulan pula, kedua sungai ini bisa dilayari dengan jarak yang cukup jauh ke arah pedalaman.

Aktivitas niaga dengan daerah pedalaman juga berkembang dengan pesat di kota Natal. Produk-produk niaga yang diperjualbelikan di kota bandar tersebut dibawa oleh saudagar dari daerah pedalaman Natal (daerah Mandahiling). Di samping menggunakan sungai (Batang Natal), para saudagar tersebut juga menggunakan jalan setapak. Selain emas dan guta percha, kopi adalah komoditas niaga yang dibawa dari daerah Mandahiling ke kota bandar Natal. Kopi yang berasal dari daerah Mandahiling pada era tanam paksa menjadi sangat terkenal, bahkan pengangkutannya ke kota Padang sangat diperhatikan oleh

penguasaan Hindia Belanda. Hubungan antara Natal dengan daerah pedalaman juga mendapat perhatian yang serius oleh penguasa kolonial tersebut.

Jalanan perdagangan dengan daerah pedalaman juga terjadi di kota bandar Air Bangis, Sasak, Tiku, Pariaman, Koto Tengah, Padang, dan Inderapura. Daerah pedalaman yang menyuplai kota bandar Air Bangis dengan berbagai jenis barang dagangan adalah kawasan Ophir, Talu, dan Rao. Kota bandar Sasak disuplai oleh daerah pedalaman Ladang Panjang, Bonjol, dan Lubuk Sikaping. Kota bandar Tiku disuplai oleh daerah pedalaman Maninjau dan Agam. Sedangkan daerah pedalaman yang menyuplai kota bandar Pariaman, Koto Tengah, dan Padang dengan berbagai jenis barang dagangan adalah daerah Tanah Datar dan Solok.¹²

Berbeda dengan kawasan di utara (Singkel, Barus, dan Natal), hubungan antara Air Bangis, Sasak, Tiku, Pariaman, Koto Tengah, dan Padang dengan daerah pedalaman lebih bertumpu pada jalan setapak. Ada jalan setapak yang menghubungkan kota-kota pantai tersebut dengan daerah pedalaman. Ketika Belanda memperluas kekuasaan politik dan ekonominya ke daerah pedalaman, jalan-jalan setapa yang telah ada sejak masa legendaris ini kemudian ditingkatkan mutunya menjadi jalan raya. Padahal, semula jalan itu hanya bisa dilalui pedati, tetapi kemudian dikembangkan sehingga dapat dilalui kendaraan bermotor.

¹²Daerah pedalaman yang menyuplai kota bandar Inderapura dengan berbagai jenis barang dagangan akan dibahas pada bagian IV.D.

Jaringan perdagangan antarkota bandar di kawasan pesisir barat mulai bergairah sejak hadirnya penguasa Aceh di daerah ini. Penguasa dari utara itulah yang menata kontak niaga antarkota pantai. Setidaknya ada tiga wilayah perdagangan kota pantai yang dikembangkan penguasa Aceh, yaitu: 1) wilayah perdagangan kota pantai di kawasan utara; 2) wilayah perdagangan kota pantai di kawasan tengah, dan; 3) wilayah perdagangan kota pantai di bagian selatan. Produk-produk perdagangan yang dihasilkan berbagai kota pantai pada masing-masing wilayah perdagangan tersebut dikumpulkan pada sebuah kota pantai terbesar di wilayah itu. Misalnya, berbagai produk perdagangan yang dihasilkan Barus, Singkel, Trumon, Tapak Tuan, Susu, dan Meulaboh harus dikumpulkan langsung ke Kotaraja. Dalam proses pengumpulan ke Kotaraja itulah aktivitas niaga antarkota pantai terjadi.

Pola yang sama juga berlaku di kawasan perdagangan antarkota bandar di bagian tengah. Semua produk niaga yang dihasilkan Natal, Air Bangis, Sasak, Tiku, dan Koto Tangah (pada mulanya) harus dibawa dan dikumpulkan di Pariaman. Dalam proses pengumpulan inilah terjadinya kontak dagang antarkota pantai dalam zona niaga tengah ini.

Di wilayah bagian selatan, semua komoditas niaga yang dihasilkan dari kawasan Bandar X (Bandar Sepuluh) yang terdiri dari Batangkapeh, Taluk, Taratak, Sirantiah, Ampiakparak, Kambang, Lakitan, Pelangai, Sungaitunu, dan Pungasan, serta daerah-daerah di selatannya seperti Air Haji selanjutnya dikumpulkan di Inderapura. Dalam proses

pengumpulan berbagai komoditas niaga itu pulalah kontak dagang antarsesama kota pantai terjalin.

Jaringan perdagangan antarkota pantai kemudian semakin berkembang ketika VOC dan pemerintah Hindia Belanda (serta EIC) berkuasa di kawasan ini. Para penguasa itu, yang hingga perempat kedua abad ke-19 hanya menguasai kawasan pantai, sangat membutuhkan adanya aktivitas perdagangan antarkota pantai di kawasan ini. VOC dan pemerintah Hindia serta EIC, dalam waktu yang lama, hanya memiliki basis di kawasan pantai. Di kota-kota pantai inilah loji-loji atau kantor-kantor dagang mereka butuhkan. Bila kontak dagang antara sesama kota pantai ini berjalan dengan efektif, maka hiduplah ekonomi mereka. Sebaliknya, bila aktivitas niaga tersebut mandeg atau lesu, maka lesu pula atau bahkan merugilah mereka.

Aktivitas niaga antar-kota pantai mencapai puncaknya pada paruh kedua abad ke-19. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda berdaya upaya menghidupkan dan menggairah kegiatan perdagangan di semua kota pantai. Untuk mendukung upayanya, pemerintah kolonial bahkan melengkapi kota-kota pantai tersebut dengan pelabuhan laut yang memadai. Ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan perusahaan perkapalan “nasional”, kapal-kapal perusahaan itu diwajibkan melayani semua kota pantai tersebut. Aktivitas perdagangan kota pantai ini menjadi sangat penting bagi pemerintah Hindia Belanda, karena kota-kota pantai inilah yang memegang peranan penting dalam proses pengumpulan dan distribusi kopi, yang ditanam

melalui sistem tanam paksa oleh penguasa kolonial itu di wilayah *Gouverment van Sumatra's Westkust*.¹³

B. Inderapura sebagai Salah Satu Intraport Pantai Barat Sumatera

Bila dilihat dari perspektif geografis yang lebih luas, Kerajaan Inderapura berada pada belahan selatan kawasan barat Sumatera. Negeri atau kerajaan ini terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, sebuah garis yang membagi dua Sumatera sama besar (secara astronomis, Sumatera berada pada koordinat 5° 40' LU hingga 5° 59' LS). Keberadaan garis khatulistiwa ini sangat berarti dalam pergerakan arus laut dan arah angin di Samudera Hindia umumnya, dan perairan di lepas pantai barat Sumatera pada khususnya. Arus laut dan arah angin di Samudera Hindia memang memiliki kekhasan tersendiri. Kedua fenomena alam ini juga berlaku di Inderapura.

Menurut buku *Zeemansgids voor den Oost-Indisches Archipel*, ada dua fenomena alam yang sangat penting dalam kaitannya dengan aktivitas/kebudayaan bahari dari semua daerah yang berada di dalam zona perairan Samudera Hindia, yaitu adanya pola pergerakan arus laut dan sistem/arah angin yang berlaku tetap di kawasan itu. Ada dua pola pergerakan arus laut di perairan barat Sumatera. *Pertama*, pola yang

¹³Bagaimana bergairahnya dunia perdagangan antar kota pantai ini (terutama di kota-kota pantai bagian utara Sumatera) dapat dilihat dalam buku Muhammad Saleh Dt. Orang Kaja Besar, *Riwajat Hidup dan Perasaan Saja* (Terj. S.M. latif) (Bandung: Badar, 1965).

berlaku pada bulan Desember, Januari, dan Februari. *Kedua*, pola pergerakan arus laut yang terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus. Pada bulan Desember, Januari, dan Februari arus laut di kawasan yang berada di utara garis khatulistiwa bergerak dari tenggara ke arah barat laut, sedangkan di kawasan selatan garis khatulistiwa arus laut bergerak dari barat laut menuju tenggara. Pada bulan Juni, Juli, dan Agustus di kawasan utara garis khatulistiwa arus laut bergerak dari barat laut, sesampainya di garis khatulistiwa arus tersebut berbelok ke barat menuju Samudera Hindia. Di kawasan selatan garis khatulistiwa arus laut bergerak dari tenggara menuju barat laut, dan sesampainya di garis khatulistiwa bergerak ke arah barat menuju Samudera Hindia.¹⁴

Sama dengan pola arus laut, juga ada dua sistem/arah angin yang berlaku di kawasan perairan sebelah barat Sumatera: pertama, sistem/arah angin yang bertiup pada bulan Januari dan Februari; serta kedua, sistem/arah angin yang berhembus pada bulan Juli dan Agustus. Secara umum, pada bulan Januari dan Februari, di perairan sebelah barat Sumatera bertiup angin dari arah barat laut dan utara. Arah angin seperti ini memudahkan pelayaran kapal atau perahu yang datang dari arah utara menuju selatan kawasan ini. Pada bulan-bulan itu, pergerakan kapal/perahu ramai dari kota-kota bandar di utara menuju kota-kota bandar di selatan Sumatera. Pada bulan Juli dan Agustus bertiup angin dari arah tenggara atau selatan. Arah angin seperti ini memudahkan pelayaran kapal atau perahu yang datang dari

¹⁴Ministerie van Marine, Afdeeling Hydrographie, *Zeemansgids voor den Oost-Indisches Archipel* (Deel I). 's-Gravenhage: Mouton & Co., 1899, Bijlage 1,2.

arah selatan menuju utara di kawasan tersebut. Pada bulan-bulan itu ramai pula pergerakan kapal/perahu dari kota-kota bandar di selatan menuju kota-kota bandar di utara Sumatera.¹⁵

Pola pergerakan arus laut dan sistem/arah angin seperti yang disebut di atas berdampak langsung pada hubungan Inderapura dengan negeri/daerah tetangganya. Hingga kurun waktu kedatangan bangsa Eropa, aktivitas pelayaran dan perkapalan serta perniagaan Inderapura sesungguhnya lebih mengarah ke kawasan selatan. Itulah sebabnya banyak cerita rakyat atau tradisi lisan setempat mengaitkan keberadaan negeri itu dengan negeri-negeri di bagian selatan Sumatera, bahkan juga dengan Kerajaan Banten.¹⁶

Inderapura khususnya dan kawasan barat Sumatera pada umumnya, tersambung oleh Samudera Hindia dengan berbagai pusat niaga dan politik di anak Benua India dan Jazirah Arab. Posisi geografis dan didukung pula oleh adanya pola arus laut dan sistem/arah angin di perairan itu, memudahkan pergerakan kapal dan pelaut dari anak Benua India atau Jazirah Arab mencapai kota-kota bandar di kawasan barat Sumatera.

Laut dengan fenomena alamnya yang memiliki pola arus laut dan arah angin, juga memegang andil besar dalam proses kedatangan orang Eropa ke Inderapura khususnya dan kawasan barat Sumatera pada umumnya. Kapal-kapal layar

¹⁵*Ibid*, Bijlage 3,4.

¹⁶William Marsden, *op.cit.*, hal. 353.

Eropa seperti Portugis, Perancis, Belanda, dan Inggris memanfaatkan arah angin yang secara umum bertiup di Samudera Hindia sehingga mereka berhasil mendatangi kawasan barat Sumatera pada umumnya, juga kota Inderapura khususnya.¹⁷

Sebagaimana kota bandar atau kerajaan lain yang ada di kawasan barat Sumatera, Inderapura (baik sebagai kota bandar atau kerajaan) tampil di panggung sejarah karena adanya potensi alam yang dimilikinya. Karena panggilan dan rayuan berbagai potensi alam ini, para saudagar dari berbagai negeri dan bangsa mendatangi kawasan barat Sumatera umumnya dan Inderapura khususnya.

C. Perdagangan di Kesultanan Inderapura

Inderapura tampil ke panggung sejarah karena adanya komoditas yang dihasilkan negeri atau kerajaan itu. Pada tahap yang paling awal, walaupun jumlahnya tidak begitu banyak, emas adalah komoditas andalan yang dihasilkan negeri yang juga disebut dengan Negeri Dua Puluh Kota ini. Emas didulang di sejumlah kawasan sungai yang ada di negeri/kerajaan tersebut, dan juga didapat dari penambangan di kawasan Kerinci.

Perdagangan emas, sebagai disebut J. C. van Leur memang dilakukan dalam skala kecil. Hampir tidak ada perdagangan komoditas tersebut yang dilakukan dengan

¹⁷P.A. Tiele, "De Europeer in den Indische Archipe, 1507-1525" dalam *BKI*, IV,1, 1888, hal. 33.

skala besar-besaran. Jumlah emas yang dibawa oleh para pedagang ke pusat-pusat perniagaan tidak banyak. Di samping resiko (bahaya) yang tinggi, jumlah emas yang didapat dari berbagai kegiatan pendulangan dan penambangan juga relatif terbatas. Walaupun demikian J. C. van Leur menyebut bahwa perdagangan emas adalah sebuah perdagangan yang bergengsi dan bernilai tinggi. Jumlah yang diperdagangkan memang tidak banyak, namun harganya mahal.

Pada awalnya, emas Inderapura diperdagangkan dengan para saudagar yang datang dari kawasan selatan. Para saudagar Jawa dan China yang datang dari Banten menjadi pembeli utama emas Inderapura. Di samping membeli emas (yang jumlahnya tidak begitu banyak), para pedagang ini juga mengunjungi berbagai negeri lain yang berada di bagian selatan Sumatera. Kunjungan ke negeri-negeri lain tersebut ditujukan untuk membeli emas, yang biasanya juga tersedia dalam jumlah yang relatif sedikit. Pembelian dengan jalan mengumpulkan emas dalam jumlah yang sedikit demi sedikit ini menjadi model dalam perdagangan emas di kawasan selatan Sumatera khususnya, dan pantai barat Sumatera pada umumnya.

Berbeda dengan Barus, Tiku, dan Pariaman, tidak ada catatan sejarah kuno yang menyebut emas Inderapura dibeli oleh para saudagar dari India dan Arab. Bahkan sangat sedikit, atau tidak ada catatan mengenai perdagangan emas Inderapura dengan Aceh. Namun sesutau yang menarik, emas Inderapura (sebagaimana juga emas yang dihasilkan oleh

negeri-negeri lain di Sumatera) memang sangat dicari oleh para saudagar Eropa. Terbukti bahwa segera setelah menduduki Malaka, tahun 1518 Portugis mengirim satu armadanya ke kawasan panta barat Sumatera. Hendrik Kroeskamp menyebut bahwa pengiriman armada tersebut dilakukan dalam upaya mencari emas. Sayangnya Portugis gagal mendapatkan emas dalam jumlah yang banyak. Di samping Portugis, Perancis juga pernah mengirim armada niaganya ke kawasan barat Sumatera. Hendrik Kroeskamp menyebut bahwa pengiriman armada tersebut dilakukan dalam upaya mencari emas. Namun berbeda dengan Portugis, armada Perancis berhasil mendapat emas, walaupun dalam jumlah sedikit. Menariknya lagi, emas ini didapat Perancis di Inderapura.¹⁸

Keberhasilan Perancis ini terjadi pada tahun 1529. Artinya, pada waktu itu Inderapura telah tumbuh menjadi sebuah kota bandar sehingga didatangi oleh pedagang mancanegara. Tidak mungkin sebuah negeri didatangi oleh sebuah armada dagang mancanegara, jika negeri tersebut hanya berupa sebuah kampung nelayan yang kecil, atau sebuah kampung yang hanya dimukimi oleh beberapa keluarga saja. Armada dagang (mancanegara) hanya mendatangi sebuah kota bandar yang besar, di mana aktivitas niaga telah tumbuh dan terlaksana dengan cukup bergairah.

Berlabuhnya sebuah armada dagang (mancanegara) mengikuti sejumlah proses. Pelabuhan yang disinggahi haruslah besar dan memiliki dasar yang dalam, kalau ini tidak

¹⁸Hendrik Kroeskamp, *op.cit.*, hal. 10.

dipenuhi maka tidak mungkin armada niaga (kapal samudera) yang ukuran besar itu bisa berlabuh dan merapat. Sebuah armada dagang yang berlabuh di sebuah pelabuhan juga wajib membayar sewa (pajak) pelabuhan. Tidak mungkin armada niaga asing (Perancis) mau berlabuh di Inderapura dengan mengeluarkan *anker geld* hanya untuk sebuah kedatangan yang sia-sia, atau tanpa adanya jual beli.

Sebuah armada niaga asing (Eropa) biasa berlabuh di sebuah pelabuhan dalam waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Tidak mungkin sebuah pelabuhan kecil atau negeri yang kecil bisa melayani kebutuhan awak kapal yang demikian banyak, kalau Inderapura hanya sebuah pemukiman kecil. Jadi bisa dipastikan, pada pertengahan kedua dekade ketiga abad ke-16 Inderapura telah tumbuh menjadi sebuah kota bandar. Karena itu, bisa pula dipastikan bahwa cikal bakal negeri atau Kerajaan Inderapura telah tumbuh beberapa tahun atau beberapa dasawarsa sebelumnya. Sebab, tidak mungkin sebuah negeri atau kerajaan tiba-tiba saja muncul dan langsung menjadi besar. Ada proses yang mesti dilalui oleh sebuah negeri atau kerajaan untuk tumbuh menjadi besar. Proses itu biasanya memakan waktu yang lama. Sehubungan dengan itu, bisa pula dikatakan bahwa cikal bakal negeri atau Kerajaan Inderapura setidaknya telah terbentuk pada ke-15.¹⁹

¹⁹Dikaitkan dengan cerita rakyat mengenai asal-usul penduduk, negeri atau Kerajaan Inderapura, yang mengaitkannya dengan kedatangan pembesar/petinggi Kerajaan Minangkabau, maka pandangan ini kiranya bisa diterima. Para pembesar/petinggi Kerajaan Minangkabau tersebut datang ke kawasan Inderapura

Berita yang disampaikan oleh pelaut/saudagar Perancis ini mementahkan pendapat bahwa Inderapura baru muncul ketika Aceh telah hadir sebagai penguasa kawasan barat bagian utara Sumatera. Catatan pelaut/saudagar Perancis ini juga mengisi kekosongan informasi mengenai Inderapura dalam catatan perjalanan yang dibuat oleh Portugis. Armada Portugis yang mendatangi pantai barat Sumatera tahun 1518 tidak menyinggahi Inderapura. Tome Pires yang membuat catatan mengenai sejumlah kedatuan dan kerajaan yang ada di Sumatera, juga tidak menyebut adanya negeri atau Kerajaan Inderapura, termasuk pantai barat Sumatera pada kurun waktu 1512-1515.²⁰

Sebuah tafsiran mengenai luputnya keberadaan negeri atau kerajaan ini dari pengamatan/kunjungan pelaut atau pedagang Portugis disebabkan oleh lokasinya yang tidak berada persis di pinggir pantai, namun berada di pinggir, beberapa kilometer ke arah pedalaman.

Travelogue armada niaga Perancis juga menyebut bahwa di samping berhasil mendapatkan sedikit emas, mereka juga berhasil membeli dua bahar lada.²¹ Sama dengan emas, secara kuantitas lada yang dibeli juga sangat sedikit. Dalam dunia pantai barat Sumatera, bahar adalah satuan ukuran yang lazim dipakai. Namun penerapan satuan ukuran ini sangat beragam. Secara umum sebelum tahun 1667, 1 bahar setara dengan 3 pikul, setara dengan 3 karung, setara dengan

pada saat kerajaan itu mulai mengalami kemunduran, dan kemunduran itu telah terjadi pada abad ke-15.

²⁰Lihat Armando Cortesao, *op.cit.*, 133-166.

²¹Hendrik Kroeskamp, *op.cit.*, hal. 10.

375 pond, setara dengan 150 kati Barus, 200 kati Melayu, dan 300 kati China. Setelah tahun 1667, 1 bahar setara dengan 3 pikul, setara dengan 375 pond, setara dengan 165 kati Barus, setara dengan 220 kati Melayu, setara dengan 330 kati China, dan setara dengan 412 ½ pond.²²

Walaupun jumlahnya sedikit, informasi yang disajikan armada Perancis ini sangat bermakna. Artinya, pada saat itu lada telah menjadi salah satu komoditas perdagangan Inderapura. Informasi ini juga membantah pendapat yang mengatakan bahwa lada baru mulai ditanam dan menjadi barang perdagangan di pantai barat Sumatera umumnya, dan di Inderapura khususnya pada pertengahan abad ke-16.²³ Keterangan Perancis ini sekaligus menegaskan bahwa lada telah tumbuh dan diperdagangkan, setidaknya sejak awal abad ke-16.

Lada memang menjadi komoditas perdagangan yang sangat dicari sejak abad ke-16 hingga abad ke-18. Pada awalnya lada ini banyak dicari saudagar India dan China. Namun kemudian permintaan yang paling besar justru datang dari Eropa. Christine Dobbin bahkan menyebut lada merupakan produk konsumen besar pertama bagi Eropa yang berasal dari daerah tropis, jauh sebelum gula, kopi, dan teh.²⁴

Lada umumnya tumbuh di kawasan barat Sumatera, mulai dari utara Pasaman (kawasan sekitar Sungai Masang dan Batang Pasaman) hingga daerah sekitar Bayang dan Inderapura di selatan. Daerah yang paling cocok untuk

²²Hendrik Kroeskamp, *op.cit.*, Bijlage IV.

²³Christine Dobbin, *op.cit.*, 72.

²⁴Christine Dobbin, *op.cit.*, 72.

penanaman lada ini adalah kawasan yang memiliki tanah rata di tepi sungai, namun tidak persis di pinggir sungai itu (tidak tergenang atau terendam bila banjir). Letak yang dekat dengan pinggir sungai juga ditujukan untuk memudahkan pengangkutan bila lada telah dipanen.

Kawasan Inderapura, seperti yang telah disebut pada bagian terdahulu, memiliki sangat banyak sungai, sangat cocok untuk budidaya tanaman ini. Seperti yang disebut Kathirithamby-Wells, pada pertengahan abad ke-16 lada telah menjadi komoditas dagang utama di pantai barat Sumatera, termasuk Inderapura. Kebetulan pada saat itu, Aceh telah tampil menjadi penguasa pantai barat, dan penguasa ini memonopoli semua kegiatan perdagangan di semua daerah yang dikuasainya. Artinya, perdagangan lada Inderapura juga berada dalam kontrol dan monopoli Aceh.

Pada hari-hari pertama kekuasaan Aceh di Inderapura, negeri ini nyaris tidak berperan dalam perdagangan lada. Lada yang dihasilkan negeri ini dibawa ke Pariaman. Di mata Aceh, pelabuhan Inderapura tidak cocok dijadikan sebagai pelabuhan pengumpul (*stapelplaats*). Pelabuhan Inderapura sangat kecil dan fasilitas yang dimiliki juga tidak lengkap. Politik niaga Aceh ini kemudian menimbulkan kemarahan penduduk Inderapura. Mereka memprotes kebijakan tersebut, bahkan sempat menyerang Pariaman. Perseteruan berakhir dengan dijadikannya Inderapura sebagai *stapelplaats* lada untuk kawasan selatan. Kebetulan pula, pada perempat terakhir abad ke-17, Inderapura menghasilkan lada dengan jumlah yang banyak dan bermutu sangat bagus.

Pada saat inilah dunia niaga tumbuh dengan cukup signifikan. Jaringan perdagangan dengan daerah sekitarnya cukup bergairah, terutama dengan kawasan yang berada di selatan, utara, dan pedalaman. Daerah pedalaman Inderapura (atau Bandar Sepuluh), terutama Alam Surambi Sungai Pagu berubah menjadi kawasan pemasok utama bagi sejumlah komoditas perdagangan di Inderapura. Sebagai *stapelplaats*, barang-barang perdagangan yang terkumpul di Inderapura dikirim ke Kutaraja. Dalam perspektif sejarah lokal Inderapura, bisa dikatakan bahwa pada saat inilah sistem sentralisasi dan monopoli perdagangan —yang dikuasai oleh pedagang dari “luar”—hadir pertama kali di Inderapura.²⁵

Sebelum kehadiran Aceh, aktivitas niaga di Inderapura berlangsung dengan sistem perdagangan bebas. Hal ini terlihat dari diizinkan kapal Perancis berlabuh dan melakukan perdagangan di sana. Di samping itu, para saudagar dari Banten (baik saudagar Jawa atau China), serta saudagar dari negeri-negeri di bagian selatan dapat datang dan bertransaksi dengan leluasa di Inderapura. Artinya, jaringan perdagangan Inderapura memang lebih mengarah ke kawasan selatan dengan Banten sebagai episentrumnya. Pola pergerakan arus laut dan sistem/arah angin yang bertiup di daerah tersebut memang mengikat Inderapura dengan kawasan selatan di pesisir barat Sumatera itu.

²⁵Sebelum kehadiran Aceh, aktivitas niaga Inderapura berlangsung dengan sistem perdagangan bebas, dan kontak dagang sesungguhnya lebih banyak dilakukan dengan negeri-negeri di bagian selatan, dengan pusat kegiatan perdagangan, ekonomi, dan politiknya berada di Banten.

Perubahan mulai terjadi ketika Aceh hadir. Aceh mengarahkan kontak niaga Inderapura dengan kawasan di utara, yakni Kutaraja. Pola niaga yang dijalankan Aceh ini kemudian dilanjutkan oleh VOC. Kompeni dagang tersebut tetap mengarahkan aktivitas niaga Inderapura ke utara, yaitu diawali ke Pulau Cingkuak dan selanjutnya ke kota Padang.

Dunia niaga Inderapura segera mundur ke titik terendah pada saat emas tidak banyak dihasilkan lagi, juga pada saat lada tidak lagi menjadi primadona perdagangan dunia. Hal ini sesungguhnya terjadi pada paruh kedua abad ke-18. Kebetulan atau tidak, sejak saat itu (bahkan sejak beberapa waktu sebelumnya) Kesultanan Inderapura selalu berada dalam kekacauan politik. Para petinggi kerajaan atau pihak-pihak yang berhak menempati tahta kerajaan saling berebut kuasa. Perebutan kekuasaan tersebut membawa Kesultanan Inderapura pada kondisi yang lemah dan nyaris tidak memiliki kedaulatan lagi. Kenyataan tersebut disebabkan oleh adanya pihak yang bertikai. Mereka meminta bantuan kepada VOC (dan juga dan EIC) dalam upaya mendapatkan tahta kerajaan. VOC dengan senang hati meladeni permintaan bantuan tersebut. Sebab, kompeni dagang tersebut membutuhkan Inderapura yang kaya akan lada. Apalagi setiap kali bantuan diberikan, selalu ada imbalan kemudahan dalam berniaga serta hak penguasaan wilayah untuk VOC dari pihak yang meminta bantuan.

Kekacauan politik itu berlangsung dalam waktu yang lama. Ekspansi militer VOC yang dikirim ke Inderapura datang silih berganti. Banyak kontrak/perjanjian yang sudah dibuat oleh VOC dengan berbagai pihak yang bertikai di sana.

Kerugian moral maupun material (yang dialami VOC dan Inderapura) juga tidak terhitung jumlahnya. Penaklukan Inderapura secara total akhirnya terjadi pada tahun 1824.

Segera setelah penaklukan tersebut, tepatnya tahun 1825, pemerintah menjadikan (bekas) Kesultanan Inderapura sebagai sebuah *regenstschap* (keregenan). Pada saat yang sama, pemerintah Hindia Belanda mengangkat Marah Yahya (anak sultan Inderapura yang terakhir) sebagai *regent*(regen) dengan nama Ahmadsyah. Dengan diangkatnya Ahmadsyah sebagai regen, resmiah dia menjadi bagian dari *Inlandsche Bestuur*.²⁶

Sebagai penguasa dalam jajaran pemerintah Hindia Belanda, Ahmadsyah hanya menjadi alat dari mesin kekuasaan pemerintah kolonial. Tidak banyak kisah sejarah Inderapura yang disajikan sepanjang masa pemerintahan dengan sistem keregenan ini. Apalagi daerah pemerintahan ini sudah sangat sedikit. Di selatan ada keregenan Muko-Muko (yang dikuasai Inggris), ke utara ada Keregenan Air Haji, dan ke arah pedalaman kekuasaannya nyaris tidak eksis. Sebab, secara administratif daerah yang berada di pedalaman Inderapura saat itu masih berupa *terra incognita* Hindia Belanda.

²⁶Pemerintah *ke-regen*-an di Inderapura berlangsung hingga tahun 1911. Pada tahun itu, regen terakhir dipensiunkan dengan hormat dan tidak digantikan lagi. Bahkan secara administratif Inderapura nyaris tidak diakui lagi. Hal ini terlihat dari dijadikannya Inderapura hanya sebagai daerah administratif setingkat *district* dari *Ofderafdeeling* Balai Selasa, di *Afdeeling* Painan. Lihat *Encyclopaedie, op.cit.*, hal. 151.

BAB IV

ISLAM DALAM KESULTANAN INDERAPURA

Menelusuri asal usul kesultanan Inderapura terutama pada masa-masa sebelum abad keenam belas, seperti mengurai benang kusut yang tidak jelas ujungnya. Perjalanan sejarah kesultanan Inderapura sendiri barulah agak terang dengan adanya catatan-catatan dari transmisi kesaksian lisan melalui naskah-naskah yang ditulis beberapa abad setelahnya, serta catatan-catatan asing yang ditulis setelah masuknya bangsa Barat.

Naskah sebagai wujud ‘memori kolektif’ pada awalnya ‘terbenam’ dalam interaksi oral masyarakatnya dari generasi ke generasi. Meskipun naskah merupakan sumber lokal yang dapat digunakan untuk menelusuri sejarah kesultanan ini secara spesifik, namun sangat disadari bahwa pengalihan dari kesaksian oral ke bentuk naskah tertulis barulah dilakukan beberapa abad kemudian. ‘Kesaksian-kesaksian’ itu telah mengalami rentang waktu yang panjang sebelum ditulis, maka tidak mustahil telah terjadi interpolasi di sana sini dalam proses transmisinya.

Pengungkapan asal usul Kesultanan Inderapura, setidaknya terdapat dua versi. *Pertama*, keberadaan Kesultanan Inderapura dianggap *usali* (asli), sebagai pelanjut

tradisi pemerintahan sebelumnya, bahkan konon dianggap bahwa dari sinilah awal mula kerajaan-kerajaan Melayu pada umumnya, termasuk kerajaan Minangkabau. *Kedua*, Kesultanan Inderapura sebagai bagian dari kerajaan besar Minangkabau, yang pada zaman purba mempunyai wilayah kekuasaan (hampir) meliputi pulau Sumatera.¹

Perbedaan versi itu telah mengakibatkan penggalian informasi kesejarahan dari sumber-sumber lokal sering sangat kabur, saling kontroversi, dan adakalanya saling menunjang. Akan tetapi, yang sering ditemukan dalam banyak sumber lokal adalah penonjolan sejarah yang penuh subyektivitas dan pengunggulan pandangan sendiri, saling klaim, saling bertubrukan, dan bahkan seringkali tidak memiliki titik temu yang jelas karena sentimen masing-masing. Semua itu tentunya sangat ditentukan oleh berbagai kepentingan yang menyertainya.

Penelusuran tentang Kesultanan Inderapura dalam pembahasan ini tidak serta merta dalam satu kesatuan tematis yang berdiri sendiri. Karena itu, betapa pun kendala keterbatasan sumber untuk penelusuran terhadap masa-masa sebelumnya, namun sumber-sumber lokal yang kontroversial itu akan dianalisis serta dibandingkan dengan sumber-sumber asing yang dapat ditemukan. Dengan demikian, paling tidak diharapkan sedikit mengurangi 'kabut' mitologis keberadaan Kesultanan Inderapura itu sendiri.

¹William Marsden, *Sejarah Sumatera*, Bandung: Rosdakarya, 1999, hal. 200.

Aktifitas Pelayaran di Pesisir Barat Sumatera

Peranan Sumatera sebagai wilayah komoditi dagang utama semenjak sebelum Masehi telah banyak dikemukakan dalam berbagai sumber. Salah satu komoditi yang terkenal sejak lama di Sumatera ialah emas. Ini dikemukakan dalam berbagai catatan pengembaraan para pelancong Eropa, seperti Tome Pires, Joao de Barros, Fernao Mendes Pinto, serta Jan Huygen van Linschoten yang selalu menceritakan kekayaan emas Sumatera. Bahkan, konon keutamaan komoditi ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama yang menceritakan bahwa anak buah Hiram, raja Tyrus berlayar ke *Ophir* untuk mencari emas yang akan dipersembahkan kepada Nabi Sulaiman a.s. raja Israel. Kuat dugaan ahli sejarah bahwa yang dimaksud dengan *Ophir* itu adalah sebutan pulau Sumatera sekarang². Hal inilah yang kemudian mengundang ramainya penjelajahan Arab dan Eropa pada rentang abad-abad sesudah Masehi. Tujuannya adalah untuk mencari emas dan komoditi lainnya seperti kapur dan lada di kawasan ini.

Sebelum kedatangan bangsa Barat, orang-orang Arab telah terlebih dahulu mengunjungi pulau ini. Menurut Marsden, dua orang Arab pertama telah mengunjungi pulau ini sejak abad ke-9 Masehi. Meskipun tidak disebutkan nama keduanya, namun dari laporan perjalanan mereka diketahui keberadaan pulau Sumatera. Mereka menceritakan sebuah

²Walaupun Marsden meragukan bahwa sebutan *Ophir* untuk pulau Sumatera, namun pada bagian lain dari bukunya menjelaskan tentang sebuah gunung tertinggi yang terdapat di Pasaman bernama *Ophir*. Ini agaknya dapat memberikan indikasi bahwa apa yang disebut dalam Perjanjian Lama itu sedikit memperoleh kebenaran.

pulau bernama Ramni terletak antara *Sarandib* dan *Shin*. Sebutan *Sarandib* inilah yang banyak ditemukan dalam pemberitaan-pemberitaan Arab selanjutnya.³ Diduga bahwa nama *Sarandib* itu adalah Sumatera,⁴ sehubungan dengan perubahan sebutan Arab atas kata Sanskerta *Swarnadwipa*, yang berarti “pulau emas”.⁵ Bersamaan dengan itu, ternyata sumber-sumber lokalpun telah lazim menyebut pulau Sumatera ini dengan pulau emas (*ameh*), sebagaimana terdapat dalam “*Kaba Cindua Mato*”, juga ‘*tanoh emas*’ seperti yang disebut dalam cerita-cerita rakyat Lampung.

Agama Islam di Pesisir Barat Sumatera

Dari apa yang dikemukakan di atas, tidak mustahil bahwa masyarakat di pulau Sumatera sejak lama telah berinteraksi dengan pedagang-pedagang asing, terutama di kota-kota pelabuhan daerah pesisir, tidak terkecuali juga para pedagang yang sekaligus mubalig dari Arab atau Gujarat. Laporan seorang geografer Tunisia bernama Muhammad Sharfi tahun 1551 M, bahkan menyebutkan Sumatera sebagai salah satu daerah Islam.⁶

Sumber lokal juga banyak sekali menceritakan tentang pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Arab di pesisir barat pulau Sumatera. Naskah *Muballighul Islam* oleh Imam

³Lihat Bernard Lewis, *Arabs in History*, New York: Harper and Row, 1967, hal. 198. Hal senada juga disebut William Marsden, *op.cit.*, hal. 3.

⁴*Ibid.*

⁵Nia Kurnia Sholihat Irfan, *Kerajaan Sriwijaya*, Jakarta : Girmukti Pusaka, 1983, hal.84

⁶*Ibid.*, hal. 79.

Maulana Abdul Manaf (selanjutnya disingkat dengan Naskah MI) misalnya, pernah mengemukakan tentang seorang petualang Arab yang kapalnya terdampar di pesisir barat, dan kemudian hidup dan mengembangkan Islam pada masyarakat setempat, diceritakan bahwa:

...kira-kira dalam tahun 580 Hijrah terpisahlah seorang Arab yang karam dalam perjalanannya atau pelayarannya untuk berniaga ke negeri timur ini. Dia terdampar dekat muara sungai Arau yang waktu itu belum dihuni oleh manusia, malahan yang ada hanya padang lalang dan duri di sela-sela oleh rawa-rawa. Di seberang sungai itu agak menjorok ke laut dan dinamai orang gunung Monyet, di situ banyak kera dan monyet. Setelah lepas lelahnya berjalan-jalanlah dia menengok kalau-kalau ada kampung orang yang dekat di situ. Di dalam dia berpikir-pikir di manalah kampung yang dihuni manusia, maka hanyutlah beberapa dahan kayu yang baharu dipancung orang. Melihat dahan-dahan kayu yang hanyut itu yakinlah hatinya bahwa di udik sungai itu pasti ada kampung orang, maka dibulatkannyalah hatinya hendak memudiki batang air itu dengan susah payah, sebab melalui belukar yang berduri-duri. Akhirnya bertemulah olehnya beberapa buah *dangau* [=pondok, pen.] dekat batang durian besar di pinggir sungai itu, maka pergilah orang Arab itu menemui orang *dangau* yang di bawah batang durian itu.⁷

Bila deskripsi di atas dapat dipercaya sebagai sumber, paling tidak dapat diperkirakan bahwa peristiwa itu terjadi

⁷Naskah MI, hal. 76

sekitar abad ke-12 dan 13 M. Sebab, wilayah pesisir barat Sumatera telah ramai dikunjungi oleh para pelayar asing, termasuk Arab, dan sangat mungkin mereka sekaligus menyebarkan Islam pada masyarakat setempat, sebagaimana juga digambarkan pada Naskah MI selanjutnya:

Setelah beberapa bulan Sayyid Abdullah tinggal di situ yang siangnyanya membantu orang *dangau* tempat dia tinggal itu bekerja tani, maka diberinyalah orang *dangau* itu penerangan agama Islam. Akhirnya terpahamlah oleh orang *dangau* itu akan penerangan Sayyid Abdullah, hingga seisi *dangau* itu memeluk agama Islam. Oleh orang *dangau* itu disampaikannya pula kepada kawan-kawannya pada *dangau* yang lain bahwa orang Arab itu ada membawa agama baru, agama yang benar bernama agama Islam. Oleh karena orang *dangau* tempat tinggal Sayyid Abdullah yang menjadi kepala pada dusun itu, dia yang menganjurkan memasuki agama Islam kepada seluruh penduduk dusun, maka memeluk Islamlah seluruh penduduk dusun itu.⁸

Kutipan di atas, paling tidak memberikan gambaran tentang situasi wilayah pesisir barat pulau Sumatera, terutama dalam hubungannya dengan dunia luar. Hal ini tentu akan sedikit membantu dalam melihat keberadaan pelabuhan-pelabuhan samudera yang terdapat di pesisir barat pada umumnya, tak terkecuali juga Inderapura.

⁸*Ibid.*

A. Dari Kerajaan Air Pura Ke Kesultanan Inderapura

Situs Kesultanan Inderapura terletak di wilayah pesisir barat Sumatera, tepatnya di perbatasan Sumatera Barat dan Bengkulu sekarang. Pusat kekuasaannya berada pada wilayah muara sungai yang sekarang juga bernama Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Di ujung sungai ini mengarah ke laut dengan muara yang lebih lebar dan merupakan pertemuan dua buah muara sungai, yaitu Muara Sakai dan Muara Bantaian yang mengalir dari Air Haji.

Pertemuan kedua muara ini disebut dengan *Muaro Gadang*, yang konon sejak masa sebelum Masehi merupakan pelabuhan Samudera Pesisir Barat, yang disebut Samudera Pura⁹. Di wilayah ini terdapat sebuah negeri yang bernama Air Pura di bawah pemerintahan kerajaan yang juga bernama Air Pura. Tidak banyak sumber yang dapat memastikan keberadaan kerajaan ini secara ilmiah, kecuali hanya beberapa penulisan yang didasarkan pada tradisi oral masyarakat setempat. Dalam beberapa penulisan disebutkan bahwa pada abad ke-9 Masehi, kerajaan Inderapura didirikan oleh Sultan Muhammad Syah, anak bungsu dari Sultan Maharaja Diraja yang merupakan putra Iskandar Zulkarnaini, dan berkedudukan di Air Pura sebagaimana yang disebutkan terdahulu.

⁹Emral Jamal Dt. Rajo Mudo, dalam <http://rusdalf.blogspot.com/2012/03/menelusuri-jejak-sejarah-dan-salasilah.html>, diunduh tgl, 10 Oktober 2012.

Keberadaan Inderapura sebagai kerajaan Islam sejak abad ke-16 terutama sejak perubahan kerajaan menjadi kesultanan, agaknya sulit untuk diragukan. Beberapa naskah dan sumber lokal lainnya menjelaskan bahwa perubahan sebutan kerajaan Air Pura menjadi kesultanan Inderapura dapat menjadi bukti untuk itu. Perubahan kerajaan menjadi kesultanan itu terjadi pada awal abad ke-16, yaitu pada masa pemerintahan Sultan ke-11 kerajaan Air Pura, bersama Sultan Sakelab Dunia dengan gelar Sultan Iskandar Johan Berdaulatsyah.¹⁰

Ketidaksesuaian informasi yang terdapat dalam sumber-sumber yang ada hanyalah pada perubahan nama Air Pura menjadi Inderapura. Dalam *Naskah Inderapura* disebutkan bahwa penggantian nama Air Pura menjadi Inderapura terjadi pada masa pemerintahan Sultan Inayat Syah (1357 M), tanpa menjelaskan apakah pada waktu ini sekaligus dilakukan penggantian sebutan kerajaan menjadi kesultanan atau tidak, sebagaimana keterangan berikut:

Maka pada suatu malam maka datanglah ninikhanda almarhun Sultan Muhammad Syah di dalam mimpi mengatakan tatkala hamba menjinjing *melatih (?) iko* negeri, puro emas hamba jatuh masuk [...] selama tidak dapat. Kiranya buah jatuh masuk air kiranya disambar anak dewa2 [...] dalam puro hamba itu ada sebuah *batu maniko (?)* dari ayah hamba Sultan Maharaja Diraja dari Sultan Syamsul Bahri kurang terbawa martabatnya oleh hamba, maka puro hamba itu disambar oleh peri disuruh oleh Sultan di lautan

¹⁰Yulizal Yunus, *op.cit.*, hal. 84.

nan bernama Indrapara, kalau *cucung* (cucu, pen.) hendak menukar nama negeri tukarlah dengan nama peri itu. Maka Sultan bangun pagi2 maka dipanggil Sultan besar dan manti menerangkan mimpi maka ditukarlah nama negeri Taluk Airpuro dengan Indrapara, yaitu nama peri yang memberi puro Sultan Muhammad Syah tatkala menjinjing *melatih* (?) itu negeri.¹¹

Terlepas dari masalah penggantian nama Air Pura menjadi Inderapura atau dari sebutan kerajaan menjadi kesultanan, hal lain yang mungkin dapat disimpulkan di sini ialah bahwa di kerajaan Air Pura telah berkembang agama Islam. Ini diperkuat pula dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Tim peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sumbar pada tahun 2004. Dalam laporan penelitian ini disebutkan bahwa kerajaan Air Pura sudah berdiri semenjak abad ke-9 SM. Sedangkan perubahan nama menjadi Kerajaan Melayu Air Pura terjadi pada abad ke-12, yaitu di masa pemerintahan Sultan Zatullah.¹²

Dari sumber yang disebutkan terdahulu dan sumber terakhir ini terdapat kesamaan tentang nama Sultan yang memerintah pada abad ke-12, yaitu Sultan Zatullah (Syah) maupun Sultan Inayat Syah. Bila informasi dari kedua sumber ini bisa diterima, maka dari nama Sultan itu dapat diasumsikan bahwa sejak abad ke-12 kerajaan yang terdapat

¹¹Naskah MIP, 01, hal. 335-336.

¹²Im Imaduddin, et al., *Inderapura Kerajaan Maritim dan Kota Pantai di Pesisir Selatan Pantai Barat Sumatera*. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004, hal. 13

di wilayah pesisir barat bagian tengah Sumatera ini telah menganut agama Islam. Demikian juga dengan sebutan sultan yang digunakan, tentu juga dapat memberikan indikasi bahwa kerajaan Inderapura sudah berupa kesultanan sejak abad ke-12. Hal ini berbeda dengan sumber yang disebutkan terdahulu yang mengemukakan bahwa perubahan kerajaan menjadi kesultanan terjadi pada abad ke-16. Namun kesimpulan terakhir ini tentulah masih memerlukan pembuktian-pembuktian ilmiah lebih lanjut.

B. Pemerintahan dan Struktur Birokrasi

Jika dilihat secara umum sistem birokrasi pemerintahan di Kesultanan Inderapura, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga fase. Fase pertama adalah sistem pemerintahan kerajaan lama. Jika sumber-sumber yang dijadikan rujukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka masa pemerintahan kerajaan lama ini berlangsung dari abad IX SM hingga abad XVI M. Fase kedua, masa pemerintahan kesultanan, yaitu dari abad XVI M hingga abad XIX M. Sedangkan Fase ketiga adalah masa pemerintahan keregenan yang berlangsung dari abad XIX M hingga awal abad XX M.

Perubahan Kerajaan Inderapura menjadi Kesultanan Inderapura seyogianya menjadi indikasi perubahan pola kekuasaan dalam suatu sistem pemerintahan. Paling tidak, perubahan ini menggambarkan adanya upaya pengukuhan formal sebagai salah satu sistem kekuasaan yang bercorak

Islam.¹³ Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar sistem birokrasi yang dijalankan antara kerajaan dan kesultanan. Kesultanan adalah sebutan lain dari kerajaan Islam. Di Indonesia, antara kedua istilah yang disebutkan terakhir sering di pertukarkan. Kecuali itu, bila raja-raja yang memerintah menggunakan sebutan sultan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa penggunaan sebutan sultan di kerajaan Inderapura sudah terlihat sejak abad ke-12 M. Pada saat itu, kerajaan ini dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Zatullah Syah. Pada waktu ini, tidak banyak informasi yang dapat diperoleh sehubungan dengan bentuk sistem birokrasi yang dijalankan. Sementara itu, perubahan kerajaan menjadi kesultanan barulah dilakukan pada awal abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Sakelab Dunia, gelar Sultan Iskandar Johan Berdaulatsyah. Sejak waktu ini barulah dapat digambarkan tentang bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan di Kesultanan Inderapura

Kesultanan Inderapura sejak dipimpin oleh Sultan Sekelab Dunia yang bergelar Sultan Iskandar Johan Berdaulat Syah, pada awal abad ke-16 M resmi berbentuk kesultanan. Dalam sejarah peradaban Islam, istilah sultan tidak bisa dilepaskan dengan khalifah. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam pemerintahan, dalam urusan agama (*spritual-power*)

¹³Meskipun dari penggunaan sebutan Sultan bagi raja-raja di Inderapura sejak sebelum abad ke-16 sudah memberikan indikasi keislaman itu. Namun secara formal sebutan kesultanan barulah pada abad ke-16.

dan politik (*temporal-power*),¹⁴ ganti dari Rasulullah saw. Istilah sultan, sebagai lembaga pemerintahan muncul pada masa kekhalifahan Daulah Bani Abbas, sangat koperatif dan adaptif terhadap perkembangan politik yang terjadi masanya, terutama dengan munculnya kekuatan politik baru di dalam wilayahnya. Pimpinan kekuatan politik baru yang muncul, pada awalnya di luar Bagdad, diakui dan diberi legitimasi, tapi hanya disebut sultan, bukan khalifah.¹⁵

Secara teologis, khalifah diakui memiliki hak prerogatif sebagai keturunan Bani Abbas, yang berasal dari keturunan suku Quraisy.¹⁶ Pimpinan kekuasaan yang lain,

¹⁴Istilah *spiritual power* dan *temporal power* adalah terjemahan lain dari tugas-tugas umum pemerintahan *khilafah al-Islamiyyah*. Menurut Ganai, secara literal *khilafah* berarti penggantian terhadap pendahulu, baik bersifat individual maupun kelompok. Sedangkan secara teknis, *khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. *Khilafah* merupakan medium untuk menegakkan *din* (agama) dan memajukan *syariah*. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi *din wa ad-daulah* (agama dan negara). Uraian yang cukup bagus tentang hal ini lihat misalnya artikel yang ditulis Ghulam Nabi Ganai, "Muslim Thinkers and Their Concept of Khalifah", dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XXIV, No.1, January-March 2001, hlm. 59.

¹⁵Legitimasi awal gelar dan jabatan sultan dilakukan terhadap penguasa Turki Saljuk oleh khalifah Abbasiyyah pada tahun 1055 M. Mulai semenjak itu khalifah hanya sebagai pemimpin agama semata dan berkedudukan di Bagdad, sedangkan roda pemerintahan dijalankan oleh sultan Bani Saljuk. Lihat C.E. Bosworth, *The Islamic Dynasties*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980, hal. 143.

¹⁶Dalam Hadis Nabi dikatakan bahwa para imam (pimpinan) ini hendaknya berasal dari suku Quraisy (*al-aimmatu min quraisyin*). Gelar khalifah hanya dipakai oleh mereka yang memiliki keturunan Quraisy, sementara untuk mereka yang berasal di luar garis keturunan Quraisy menggunakan gelar amir atau sultan. Oleh karenanya jabatan Khalifah dalam *Khilafah al-Islamiyah* hanya berlangsung pada masa Khulafa al-Rasyidin (632-661), Umayyah di Damaskus (661-750), Umayyah di Spanyol (750-1031), Abbasiyyah di Baghdad (750-1258), dan Fatimiyyah di Mesir (609-1171).

paling tinggi hanya sebagai sultan. Oleh sebab itu, pada masa Daulah Bani Abbas muncul beberapa kesultanan, seperti Kesultanan Bani Aglab di Afrika Utara, juga Kesultanan Bani Saljuq di Asia Barat Daya. Pada saat Bani Saljuq umpamanya, kedudukan khalifah hanya sebatas pimpinan spiritual (*spiritual-power*), sedang kekuasaan politik (*temporal-power*) diserahkan atau didelegasikan oleh khalifah kepada sultan.¹⁷

Pada tahun 1517 M, jabatan kekhalifahan beralih dari Bani Abbas kepada sultan-sultan Turki Usmani. Pada waktu itu, Khalifah Mutawakkil Alallah, khalifah Bani Abbas yang terakhir dibawa ke Istanbul oleh Sultan Salim I yang telah berhasil mengalahkan Kerajaan Mamluk di Mesir. Khalifah Mutawakkil Alallah menyerahkan jabatan khalifah yang dipegangnya kepada Sultan Salim I beserta semua barang-barang warisan khalifah. Pada waktu itu, pandangan teologis dan politis bahwa khalifah wajib dijabat oleh keturunan suku Quraisy sudah tidak dipertahankan lagi, sebagaimana yang hidup selama ini, khususnya di kalangan para ulama *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* (Suni).

Pada waktu jabatan khalifah berada di tangan sultan-sultan Turki Usmani yang pemerintahannya berpusat di kota Istanbul, pimpinan pemerintahan Islam yang berada di luar wilayah kekuasaan Turki Usmani, seperti di kepulauan Nusantara ingin mendapat pengakuan dan legitimasi dari khalifah. Sebab, tanpa adanya pengakuan dari khalifah,

¹⁷K. Ali, *Sejarah Islam dari Awal hingga Runtuhnya Dinasti Usmani (Tarikh Pramodern)*, terjemahan dari *A Study of Islamic History*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 267 dan 271.

kedudukannya sebagai kepala pemerintahan belum syah secara *syar'iy*.

Oleh sebab itu, sangat mungkin Sultan Sekelab Dunia yang bergelar Sultan Iskandar Johan Berdaulat Syah, resmi sebagai sultan pada awal abad ke-16M karena telah mendapat pengakuan dan legitimasi dari Khalifah Turki Usmani. Namun demikian, belum ditemukan dokumen, naskah atau yang lainnya, yang menunjukkan bahwa telah terjalin hubungan antara Sultan Sekelab Dunia dengan khalifah-khalifah Turki Usmani pada waktu itu, seperti Sultan Salim I (1512-1520M) dan Sultan Sulaiman II al-Qanuni (1520-1556M). Pada masa kedua orang khalifah ini, pemerintahan Kerajaan Turki Usmani mulai kuat, maju dan luas wilayah kekuasaannya, serta kuat pengaruh politiknya. Ke arah barat, wilayah Kerajaan Turki Usmani sampai ke pantai Lautan Atlantik, ke arah Timur wilayahnya berbatasan dengan Kerajaan Shafawi, ke arah utara sampai ke Asia Tengah, dan ke arah selatan berbatasan dengan Laut Arab. Oleh sebab itulah, sebahagian sejarawan menyebut Kerajaan Turki Usmani dengan Imperium Turki Usmani.

Keinginan untuk mendapat pengakuan dan legitimasi pada hakekatnya muncul dari pihak sultan, bukan khalifah. Alasan dan pertimbangannya lebih berat pada alasan teologis dari pada politis, seperti karena ingin menjadi bagian integral dari *Dar al-Islam*. Sebab, secara teologis menurut ulama-ulama Suni, pengakuan dan tunduk patuh kepada khalifah adalah wajib hukumnya. Barang siapa yang tidak mengakui dan mematuhi khalifah, hidupnya seperti orang *jahiliyah*.

Pandangan teologis tersebut didasari oleh ayat-ayat al-Quran dan Hadis, sebagaimana di bawah ini:¹⁸

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير و احسن تأويلا.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman! Patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul (Muhammad) dan ulil-amri (khalifah) di antara kamu. Maka jika kamu Berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kekuasaan Eksekutif : Dewan Menteri Kesultanan

Kesultanan Inderapura memiliki organisasi pemerintahan yang mirip dengan sistem kabinet parlementer. Seperti juga kekuasaan tradisional lainnya, kekuasaan tertinggi dipegang oleh sultan. Sedangkan pelaksana pemerintahan dijalankan oleh Dewan Menteri yang disebut *Penghulu Nan Duo Puluah*. Dewan Menteri ini dipimpin oleh *mangkubumi*. *Penghulu nan Duo Puluah* adalah pelaksana pemerintahan sehari-hari yang dipertanggungjawabkan kepada Sultan melalui *mangkubumi*.

¹⁸Q.S. Al-Nisâ', ayat : 59.

Penghulu *Nan Duo Puluah* terdiri dari tiga pihak yaitu : 8 orang di tengah disebut pihak *Nan Salapan*, 6 orang di hulu, dan 6 orang di hilir yang disebut pihak *Nan Baranam*. Sebutan di tengah, di hulu, dan di hilir merupakan batas kewenangan yang diberikan kepada masing-masing. Pihak Nan Salapan atau disebut juga *Basa Nan Salapan*(Besar yang Delapan) sebagai pihak yang paling dekat kepada Sultan dan berwenang mengatur “kampung dalam” dan urusan internal kerajaan. Sedangkan pihak yang berenam di hulu dan di hilir disebut dengan *Manti Nan Duobaleh* (Menteri yang Duabelas) dengan kewenangan mengurus berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Kedudukan masing-masing pihak akan terlihat pada saat upacara-upacara kerajaan seperti pada saat penobatan dan sebagainya. Masing-masing pihak menempati posisi yang berbeda dan memakai simbol yang berbeda pula. Pihak *Nan Salapan* di tengah memakai ikat destar berwarna kuning, pihak yang berenam di hulu dengan ikat destar berwarna merah, dan pihak yang berenam di hilir berwarna hitam.²⁰

Dewan Menteri yang disebut Penghulu *Nan Duo Puluah* (yang dua puluh) adalah jumlah kabinet dalam kesultanan Inderapura adalah bersifat tetap; tidak boleh ditambah dan dikurangi. Jumlah ini didasari oleh hikmah sifat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang berjumlah 20 sifat. Oleh karena itu, jumlah ini telah menjadi Undang-Undang Dasar kesultanan yang tidak boleh diubah meskipun Sultan yang

¹⁹*Naskah MIP*, hal. 316 dan 321.

²⁰*Ibid.*

memerintah sudah berganti. Hal ini, bahkan terpatri dalam sumpah, yang jika dilanggar akan berkonsekuensi mendapat kutukan atau laknat dari Al-Quran 30 juz.

Dari sini diketahui bahwa sistem birokrasi kesultanan Inderapura diwarnai oleh prinsip tauhid yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip Islam yang dipertahankan dalam kesultanan Inderapura juga dapat diketahui dari ucapan terakhir Tuanku Rusli bergelar Sultan Muhammad syah, Sultan terakhir Inderapura sewaktu akan dinaikkan ke kapal yang akan membawanya ke Batavia, di bawah pengawalan pasukan Belanda ia berucap dengan lantang tentang kesultanan Inderapura yang diwarisinya:

“Raja Inderapura adalah raja syarak patah tumbuh hilang berganti, hilang raja berganti raja. Beredar raja dengan syarak, berdestar syahid syabilillah, bersatu sultan dengan rakyat, beredar sultan dengan adat, beredar sanak kemenakan dengan adat pusaka. Mengitari bumi se-petalo langit, ke bawah dalam, ke awang tinggi, pergi satu, tumbuh seribu, sebanyak pasir di tepi laut, hati bagai sega! ar laut kan ganti tintanya, air tawar kan ganti gencunya, kan pembuat riwayat tanah alam, untuk diingat-ingatkan dikala sekarang, dikala nanti, karena syarak punya bersama, Allah Ta’ala menjadikannya.”²¹

²¹Emral Jamal Dt Rajo Mudo, dalam <http://rusdalf.blogspot.com/2012/03/menelusuri-jejak-sejarah-dan-salasilah.html> diunduh tgl, 10 Oktober 2012

Kewenangan Legislatif: Pucuk Adat

Selain kekuasaan eksekutif, kesultanan Inderapura juga memiliki dewan perwakilan yang disebut *Pucuk Adat* yang memegang kewenangan legislatif. *Pucuk Adat* terdiri dari para penghulu dan orang kaya yang mewakili Balai Kerapatan Adat Nagari. Lembaga yang disebut terakhir ini merupakan Dewan Perwakilan Rakyat yang dijabat oleh para penghulu yang mewakili anak kemenakan masing-masing. Sistem perwakilan ini sangat mirip dengan kepemimpinan nagari-nagari yang terdapat di Kerajaan Pagaruyung.

Dari apa yang dikemukakan terakhir ini, dapat diasumsikan bahwa sistem kekuasaan yang dijalankan di kesultanan ini tidaklah bersifat otokratis murni, sebagaimana layaknya kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya. Segala keputusan yang menyangkut anak nagari diputuskan secara musyawarah, meskipun keputusan terakhir tetap berada di tangan sultan. Namun keputusan sultan tetap didasarkan pada hasil pertimbangan musyawarah lembaga-lembaga perwakilan serta pertimbangan kebiasaan tradisional (alur) dan kebaikan bersama (patut).

Kewenangan Yudikatif dan Federatif oleh Sultan

Meskipun otoritas legislasi di Inderapura diputuskan berdasarkan permusyawaratan *Pucuk Adat* secara bertingkat dari unsur pimpinan penghulu ninik mamak, namun kekuasaan kehakiman dan penuntutan dipegang secara

langsung oleh sultan bersama dengan alat-alat kekuasaannya. Bagi rakyat sultan dipandang sebagai sosok yang penuh hikmah serta paham dengan ketentuan agama. Oleh karenanya, rakyat mempercayai bahwa dalam penegakan hukum sultan akan berlaku seadil-adilnya.

Di kesultanan Inderapura ada dua orang sultan yang sangat dikenal alim, taat beribadah, penuh kharisma, dan adil dalam mengayomi rakyat, yaitu Sulthan Mohammad Arifin syah Gelar Sulthan Mohammad syah (1840-1860), dan Sulthan Mohammad Bakhi, Gelar Sulthan Firmansyah Raja Terakhir di Inderapura (1860-1891). Bahkan karena kharisma sipiritualitas keduanya, rakyat menggelarnya dengan *Tuanku Sembah* (Tuanku yang disembah) untuk Sultan Muhammad Arifin Syah karena keshalehan dan ketaatannya beribadah, dan *Tuanku Balindung* (Tuanku tempat berlindung) untuk Sultan Muhammad Baki, karena kedekatannya dengan rakyat dan menjadi tempat berlindung dikala rakyat ditimpa kesusahan.

Selain kekuasaan yudikatif, sultan juga memiliki kewenangan dalam memutuskan berbagai kebijakan bilateral dan membuat kerja sama dengan pihak luar kesultanan, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan perdagangan. Dengan demikian, meskipun di Inderapura ketiga otoritas kekuasaan itu tidak sepenuhnya terpisah, namun sudah berlaku pembagian kekuasaan secara jelas.

C. Distribusi Kekuasaan dan Mekanisme Suksesi Kepemimpinan

Pendistribusian kekuasaan dan mekanisme suksesi kepemimpinan di Kesultanan Inderapura, adakalanya memperkuat integritas kerajaan dan adakalanya mengundang konflik internal dan eksternal. Sebagai kesultanan yang terpandang dengan identitas raja syara' (seiiring dengan raja adat di Tapan/ Basa Ampek Balai dan raja batin di Lunang) yang punya kekuatan dan kemakmuran dari pelabuhan lada dan embarkasi haji jalur perairan, Inderapura dapat dipastikan sudah memperlihatkan manajemen pemerintahan dan pemerintah yang kuat.

Kebesaran Kesultanan Inderapura seperti digambarkan Emral Jamal, sebagai pemegang kunci pembuka rahasia urat tunggang perjalanan sejarah raja-raja Kerajaan Melayu Nusantara, Sriwijaya, Darmasraya, Pariangan, Minangkabau, Pagaruyung dan Aceh yang lebih luas berpengaruh di daerah-daerah di kawasan Nusantara dan di luar nusantara melalui hubungan diplomatik.²²

Manajemen pemerintahan dan pemerintah kesultanan sudah dikelola sedemikian besar. Ada beberapa catatan penting tentang pendistribusian kewenangan dalam kekuasaan Kesultanan Inderapura. Dalam tata pemerintahan yang merujuk regulasi dan kebijakan publik di dalam kekuasaannya, raja sudah menetapkan kebijakan dan

²²Emral Jamal, "Menelusuri Jejak Sejarah dan Salasilah Kerajaan Usali Kesultanan Inderapura di Pesisir Selatan - Sumatera Barat" dalam <http://rusdalf.blogspot.com/>

pendistribusian kewenangan sesuai dengan struktur kabinet kesultanan. Pendistribusian kekuasaan itu terlihat dalam mekanisme antara lain: (a) pembagian tugas pokok; (b) fungsi; (c) kewenangan, dan; (d) tanggung jawab, sekaligus sistem pendistribusian kekuasaan dengan kewenangan yang ditetapkan.

Pertengahan abad ke-16 (1550), sultan mengadakan restrukturisasi sistem pemerintahan dan merombak kabinet menjadi bercorak parlementer. Kekuasaan (tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab) didistribusikan sesuai dengan struktur kabinet tersebut. Sultan sebagai raja dibantu seorang mangku yang disebut Pemangku Rajo, berfungsi sebagai wakil sultan dalam menjalankan tugas sebagai raja. Di bawah mangku ada jabatan mangkubumi, yang berfungsi sebagai perdana menteri dalam menjalankan pemerintah dan pemerintahan.²³

Dalam menjalankan pemerintahan, mangkubumi dibantu dua lembaga tinggi setingkat menteri, yakni: (1) Menteri/ Penghulu Nan-20 (6 di mudik, 8 di tengah, dan 6 di hilir), dan; (2) Lembaga Tingi Penghulu (*Rangkayo*). Menteri nan-20 dibantu tiga lembaga, yakni: (a) Panglima, di bawahnya ada barisan lembaga *pangghagho* (*punggawa/dubalang*); (b) lembaga orang tua, dan; (c) lembaga ulama (syekh dan atau labai). Struktur di bawah mangkubumi yang disebut “Lembaga Tingi Penghulu (*Rangkayo*)”, membawahi struktur Lembaga Imam – *Katik* (Khatib). Imam khatib bersama syekh dan atau labai

²³Yulizal Yunus, *op.cit*, hal. 95-96.

membawahi dan mengurus Lembaga Kaum (Suku – Kampung) dan Lembaga Kaum mengurus Lembaga Paruik/Jurai (anak kamanakan/ rakyat).

Pada masa pertengahan abad ke-16, dilakukan pula konsolidasi wilayah dan likuidasi pusat kekuasaan serta penguatan wilayah perbatasan. Dalam kasus likuidasi pusat kekuasaan kesultanan misalnya, “pusat kekuasaan kesultanan pernah dipindahkan dari Pasir Ganting ke Pelokan Hilir”.²⁴ Raja-raja yang diperkirakan sudah beristana di daerah tersebut antara lain: Sultan Mandaro Putih (karena makamnya terdapat di Pelokan Mudik); Sultan Marah Muhammad Ali Akbar Sultan Muhammadsyah; Inayatsyah (1640); Sultan Sulaiman (wafat, 1675 makam di Hutan); juga dalam keterangan lain sebelumnya Sultan Baridinsyah (1520), Dang Tuanku (1520 – 1524) beristeri Puti Bungsu (makamnya di Bukit Selasih, Batang Kapas); termasuk Usmansyah Sultan Firmansyah (1534 – 1556) dan lain-lain.

Demikian pula dalam mekanisme suksesi, dengan berputarnya mekanisme masa periodisasi sultan pada setiap pergantian sultan sampai sultan yang ke-33. Mekanisme masa periodisasi kepemimpinan sultan Inderapura sudah tampak berputar, meskipun tidak seteratur seperti sekarang dalam pemerintahan Republik Indonesia, yaitu berputarnya mekanisme 5 tahunan kepemimpinan presiden. Namun yang jelas, perputaran mekanisme kepemimpinan kesultanan Inderapura itu sudah menyejarah dan dapat dilihat dalam

²⁴*Naskah MIP*, hal. 241, 322

masa satu abad, tepatnya dari abad XVI (1513) sampai abad XVII (1695). Dalam perputaran mekanis kepemimpinan di kesultanan tersebut memperlihatkan adanya: (a) syarat dan kriteria pencalonan sultan; (b) kampanye calon sultan; (c) pemilihan sultan, dan; (d) pengukuhan sultan/ naik nobat.

1. *Persyaratan dan Kriteria*

Syarat dan kriteria menjadi sultan di Inderapura pada prakteknya dan banyak disebut dalam sumber manuskrip Inderapura dan tambo disebutkan: (1) dari garis keturunan ibu sejalan dengan sistem kekerabatan “matrilineal”, (2) kalau tak ada di garis keturunan ibu dijemput kader dari kerajaan pagaruyung atau kerajaan sapiah balahan atau kuduang karatan lainnya di tanah melayu, (3) laki-laki, (4) perempuan (puti) bila tidak ada laki-laki ditetapkan kerapatan (musyawarah mufakat).

Sultan dari keturunan ibu, sudah berlangsung sejak awal kerajaan Inderapura. Sultan Khairullah (*Cindua Mato*) misalnya setelah wafat, digantikan oleh anaknya Tuanku Berdarah Putih. Tuanku ini anak dari perkawinan Cindua Mato dengan seorang Putri Inderapura keturunan, yakni Tuanku Rajo Tuo.²⁵ Salah satu kasus misalnya disebutkan dalam *Manuskrip Inderapura* sebagai berikut:

“Setelah berpulang Sri Sultan Inayah Syah maka Sultan diganti oleh (anaknya-pen) Sultan Muhammad Syah zaman Sultan penghulu2 yaitu (Penghulu-pen) Besar yang Salapan, Manti yang Duabelas... diberi

²⁵Yulizal Yunus, *op.cit.*, hal. 99

berpakaian *securing gunting*(?) ikek kata orang kini karena penghulu² dari Sungai Limau dan dari Dusun Tapan dan dari negeri Padang Nunang sekali setahun datang ke Indrapuro menjunjung daulat yaitu nobat namanya”.²⁶

Tambo Minangkabau: juga menyebutkan “Raja-raja Inderapura diambil dari keturunan ibu”.²⁷ Namun dalam prakteknya tidak selalu dari keturunan ibu yang bersuamikan raja, ada yang dijemput dari pihak lain, tetapi yang dapat dicatat adalah calon sultan itu hasil musyawarah mufakat dalam kesultanan.

Sebab terjadi suksesi adalah karena raja mangkat (wafat). Juga karena adanya kudeta atau sultan terbunuh. Yang terbunuh misalnya sultan sebelum “Mazafarsyah asal Sungai Pagu (makam di Lubuk Aro). Ia menjadi Raja Inderapura sesudah Raja Sulaiman wafat. Mazafarsyah disegani. Yang tak disukai ialah Sultan Sulaiman, sehingga ia dibunuh oleh rakyat sendiri”.²⁸

2. *Kampanye Calon Sultan*

Karena calon sultan itu sudah disosialisasikan pihak istana dari awal, maka kampanye seperti sekarang tidak dilakukan, akan tetapi dilihat perilaku dan perbuatannya dalam pergaulan istana dan masyarakat. Buktinya ketika raja wafat langsung dinobatkan calon sultan yang sudah dikaderisasi. Misalnya ketika Sultan Alin bergelar Sultan

²⁶Naskah MIP, hal. 336.

²⁷Naskah Tambo Minangkabau, tt.

²⁸Yulizal Yunus, *op.cit.*, hal. 104

Malafar Syah, tidak lama berkuasa dan mengundurkan diri karena tidak kuasa menahan hati lantaran tak suka disembah rakyat, padahal ia memiliki pengetahuan syari'at yang kuat, "...maka diganti oleh saudara beliau Sultan Tunggal Alam Kadim bergelar Sultan Muhammad Syah".²⁹

3. *Pemilihan Sultan*

Rata-rata pemilihan sultan dilakukan dengan cara mufakat, atau calon sultan yang telah disosialisasikan istana. Begitu raja wafat langsung masuk pengganti. "...Setelah Sultan Malafar Syah berpulang ke Rahmatullah, maka diganti oleh mamaknya yaitu Sultan Alin bergelar Sultan Malafar Syah. Beliau ini tidak lama memegang kerajaan karena ia tidak suka disembah rakyat...".³⁰

4. *Naik Nobat*

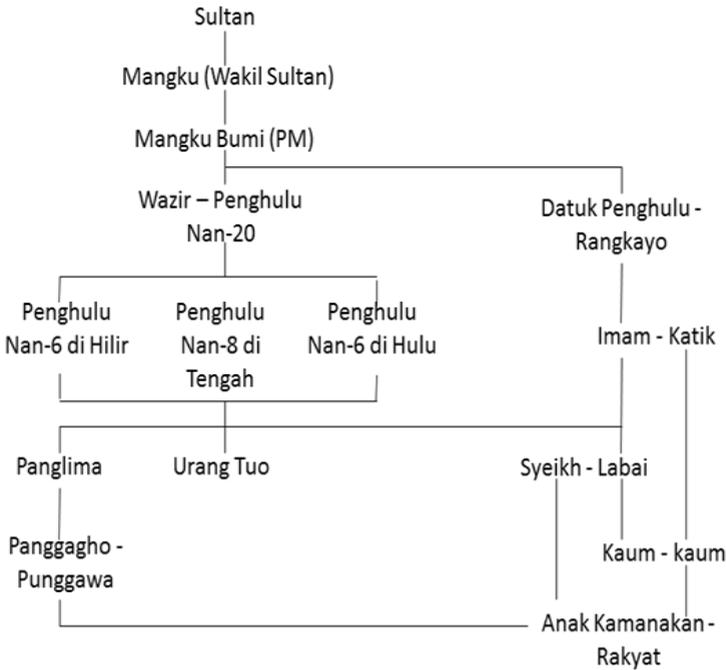
Fenomena helat penobatan sultan, pengganti Sri Sultan Inayah Syah, yakni Sultan Muhammad Syah zaman Penghulu Besar yang Salapan (Delapan), Manti yang Duabelas. Kabinetnya ini "...makai pakaian resmi berpakaian *securing gunting ikek* kata orang kini, karena penghulu2 dari Sungai Limau dan dari dusun Tapan dan dari negeri Padang Nunang sekali setahun datang ke Indrapura menjunjung daulat yaitu nobat namanya...".³¹

²⁹Naskah MIP, hal. 322-323.

³⁰*Ibid.*, hal. 323.

³¹*Ibid.*, hal. 336.

Struktur dan Mekanisme Pemerintah Kesultanan Inderapura



Jika ditelusuri lebih seksama, proses suksesi jabatan sultan Inderapura pada dasarnya adalah sebuah mekanisme suksesi kepemimpinan yang berlaku dalam tradisi adat dan budaya Minangkabau. Jabatan tertinggi dalam lingkungan adat Minangkabau diwariskan atau dilanjutkan oleh kemenakan sultan yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini, lebih diutamakan kemenakan (anak saudara perempuan) yang paling dekat pertalian darahnya. Jika tak ada atau tidak ditemukan pertalian darah yang terdekat, maka dicari kemenakan lain yang sejalur.

Dengan demikian, dapat dikatakan *pertama*, bahwa sistem suksesi jabatan sultan Inderapura berdasarkan garis keturunan *matrilineal*, sebagai mana yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Sistem suksesi jabatan sultan seperti ini berbeda dengan sistem suksesi jabatan sultan pada kesultanan lain di kepulauan Nusantara dan di Timur Tengah. Pada umumnya sistem suksesi jabatan sultan pada daerah yang lain berdasarkan sistem kekerabatan *patrilineal*. Jabatan sultan diwariskan kepada anak, atau kepada saudara, atau kepada paman (saudara ayah yang laki-laki), atau kepada anak saudara yang laki-laki. Pada umumnya yang menjadi pewaris atau pelanjut jabatan sultan di luar Kesultanan Inderapura adalah laki-laki.

Kedua, jika benar jabatan sultan Inderapura diwariskan atau diturunkan kepada kemenakan, itu artinya telah terjadi pengakuan terhadap budaya lokal, bukan menghapus atau menghilangkannya. Ini suatu bukti sejarah yang tinggi nilainya untuk mengatakan bahwa Islam sesuai untuk segala zaman dan tempat. Atau dengan ungkapan *al-Islam jilih li kulli al-zaman wa al-makn*. Sebab, ada kecenderungan pada masa sekarang, sulit untuk melaksanakan hal seperti itu. Sulit untuk mempertahankan eksistensi budaya lokal, sekaligus menjadi Muslim yang taat menjalankan ajaran agamanya. Tetapi, tidak demikian halnya pada Kesultanan Inderapura yang hidup beberapa abad yang silam.

D. Konflik Internal

Konflik internal dan eksternal sesungguhnya dapat dimaknai mempertahankan identitas, harkat, martabat, integritas, dan keberlangsungan kehidupan kesultanan dan ketenteraman rakyat, baik kepentingan kelompok keluarga kerajaan, kepentingan pelayanan publik, dan kepentingan imperialisme – kolonialisme (penjajah). Kalau Inderapura mencapai puncak kejayaannya di abad ke-17, maka dapat dicatat masa itu pula terjadi konflik yang paling banyak/sering/bekepanjangan. Konflik gaya baru justru muncul saat kejayaan dan kemakmuran sudah mengambil bentuk, yaitu lahirnya kelompok yang skeptis (prilaku banyak curiga, erosi kepercayaan, alergi dengan kebijakan, bahkan anti kemapanan, dsb). Kejayaan Inderapura masa itu, terlihat dari pelabuhan ladanya yang sudah menjadi pusat perdagangan dunia, juga menjadi embarkasi haji di pantai barat mengukuhkan identitasnya Inderapura sebagai raja syara, di samping Tapan (Basa 4 Balai), Raja Adat, dan Lunang sebagai Raja Batin.³²

Konflik di Inderapura pada perinsipnya banyak dipicu oleh berbagai kebijakan/ regulasi pelayanan publik dalam berbagai aspek kehidupan (wilayah, penduduk, sumber daya,

³²Ketika Portugis menguasai jalur pelayaran di Selat Malaka, banyak pelaku pelayaran yang mengalihkan perjalanannya ke pantai barat sumatera (samudera Hindia), akibat pajak yang diterapkan terlalu tinggi termasuk masyarakat yang bermaksud pergi haji ke Mekah. Malaka yang pada awalnya merupakan embarkasi haji, saat itu ditutup dan dialihkan oleh Belanda ke pantai barat sumatera. Ada kemungkinan Inderapura juga pernah difungsikan sebagai embarkasi haji di pantai barat tersebut seiring dengan upaya untuk mencari legitimasi kekuasaan ke penguasa Islam di Timur Tengah. Tentang dinamika perjalanan haji sebelum abad XX dapat dilihat dalam Muhammad Shaleh Putuhena, *op.cit.*, hal. 105-131.

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan), apalagi ketika itu di kawasan ini terjadi perebutan kepentingan terutama dalam percaturan politik dagang dunia internasional di pantai barat. Tekanan kaum imperialisme dan kolonialisme internasional (Inggris, Belanda, Cina, Aceh, dsb) itu tidak tertahankan oleh daya tangkal ketahanan dan keamanan istana sehingga konflik menusuk urat nadi kesultanan. Artinya, konflik terutama konflik yang berakar dari percaturan politik dan ekonomi dunia ketika itu berdampak serius kepada kerajaan. Kebesaran dan kejayaan kesultanan serta percaturan politik ekonomi internasional di kawasan ini, dampaknya tidak terelakan, memicu konflik dalam keluarga istana dalam perebutan kekuasaan menjadi sultan, terutama antara pihak bako dan anak pisang, atau pihak garis keturunan ibu dan pihak garis keturunan ayah.

Sebelumnya, abad XVI bukan tidak ada konflik, bahkan sepanjang sejarah kerajaan itu penuh dengan konflik, baik vertikal maupun horizontal, namun api pertikaian dapat dipadamkan raja dengan kebijaksanaan dan pengaruh raja. Tahun 1513, istana sesungguhnya juga mengalami goncang, namun Sultan Samejalsyah mempunyai jaringan kuat di dalam maupun luar kerajaan. Keributan dapat dipadamkan Samejalsyah, yaitu keturunan Putri Gembalo Intan anak Sultan Alidinsyah yang juga pernah menjadi raja Inderapura. Dia memperkuat sistem ketahanan *preventiver defence* kesultanan. Artinya, sultan memperkuat kerajaan dengan memfungsikan kekuatan Syahbandar Ibrahimsyah secara dini.

Pada masa Sultan Usmansyah (bergelar Sultan Firmansyah) tahun 1550, kesultanan juga mengalami konflik. Tetapi dengan kepiawaiannya, sultan segera melakukan restrukturisasi sistem pemerintahan dan merombak kabinet. Sultan dibantu seorang *mangku* (*Pemangku Rajo/wakil rajo*), kemudian dibantu lagi oleh Mangkubumi yang seolah berfungsi sebagai Perdana Menteri. Sedangkan kabinetnya terdiri dari para *Menteri Duo Puluah*. Pada masa ini juga dikonsolidasi wilayah dan pengutan perbatasan. Artinya, secara geopolitik sultan memahami wilayah perbatasan yang sering menjadi sengketa, dan ia harus memperjelas demarkasi wilayah perbatasan yang secara subkultur bukan wilayah administratif, tujuannya untuk memperkuat strategi *bargaining position*.

Hasil penetapan batas wilayah disosialisasikan, batas sebelah Utara, Airbangis-Batang Toru (Batak), selatan Taratak Air Hitam Muara Ketaun, timur Durian *Ditakuak Rajo, nibuang balantak mudik lingkaran Tanjung Simeledu* (Sepadan Jambi), barat laut *saleba ombak badebu* (seluas deburan ombak di pantai barat).³³ Karena kesultanan Inderapura sudah mendapat ketahanan wilayah, maka Inderapura sudah merasa di atas angin dan menjadi macan di pantai barat. Kekuatan kesultanan ini bertahan sampai era kuasaan SSM Alif (1560-1580 M), bahkan Inderapura yang sebelumnya terkesan Kerajaan Sapiah belahan dari kerajaan Pusat (Pagaruyung) mulai memasuki era desentraliasi, yakni tahap melonggarkan bahkan melepaskan diri dari cengkraman pusat (Kerajaan

³³Naskah MIP, *op. cit.*, hal. 228 dan 331.

Pagaruyung). Hal serupa juga diikuti oleh banyak Kerajaan Sapiah belahan lainnya di Minangkabau.

Selain penguatan ketahanan kerajaan dengan *traveling* konsolidasi batas wilayah subkultur, diikuti pula dengan *traveling* perkawinan, yakni dalam bentuk politik antar anak raja antar wilayah – kerajaan, dengan strategi penguatan kerajaan dengan kerabat. Kondisi *traveling* perkawinan itu terlihat pada tahun 1566, yakni perkawinan Puti Ambar Sarifah (saudara seapak dengan Sultan Usmansyah bergelar Sultan Firmansyah) dengan Raja Banten Sultan Hasanuddin, dan Puti Ambar Syarifah diboyong ke Serang.

Dengan ketahanan kesultanan, yang secara geopolitik terjadi pengukuhan wilayah perbatasan, dan secara geostrategis terlihat pengukuhan potensi penduduk dengan penguatan melalui *traveling* perkawinan antar anak raja, pelabuhannya juga sudah menjadi pusat perdagangan lada dunia serta embarkasi haji, Inderapura tahun 1600 memasuki masa keemasan dan mencapai puncak kejayaan sekitar tahun 1600-an. Belanda mendapat kesempatan masuk dalam arena percaturan dagang di pantai barat. Kolonialis ini masuk ke Inderapura 20 Maret 1602, dan memberikan perhatian besar terhadap kesultanan, setelah sebelumnya Inggris bersiteru dengan Aceh di kawasan ini.

Coen (VOC) tahun 1616 mengirim kapal dagang ke Inderapura berhubungan dengan raja Hitam, namun ia gagal. Maksud terselubung Belanda, ingin mematahkan bahkan memutus kekuasaan monopoli Aceh dan Inggris dalam perdagangan lada di pantai barat, sekaligus menguasai

dagang lada. Dua tahun kemudia (1618) Belanda melakukan tindakan kekerasan dengan mencegat Inggris yang sudah melakukan monopoli selama 2 tahun, juga tidak memperbolehkan berdagang lada di Inderapura. Di pihak lain, Aceh memberikan perlawanan dengan menempatkan seorang wakilnya di Inderapura (1625-1635), tanpa mengancam keamanan dan kemakmuran kesultanan Inderapura, meskipun pada gilirannya Aceh terjepit di tengah-tengah kepeningan Belanda dan Inggris, yang saling berebut lada dan emas melalui pelabuhan kesultanan Inderapura. Ternyata tahun 1632, secara *de facto* pengaruh Aceh habis di Inderapura khususnya dan pantai barat Sumatera umumnya.

Karena Aceh tersingkir dan Inggris melemah, Belanda hampir-hampir memonopoli perdagangan lada dan emas di Inderapura. Tahun 1644, Belanda pun memungut pajak lada Inderapura setiap 1200 bahar lada dikeluarkan 1 bahar, mulanya antara 300-330 kati. Meskipun demikian, Aceh tetap melakukan perdagangan gelap yang memicu kemarahan Belanda. Tahun 1656, Belanda menyatakan perang, menembaki sasaran pengaruh Aceh dan Inggris di perairan Inderapura, sehingga kapal Inggris yang sedang berlabuh di sana banyak dikuasai Belanda. Tiga tahun kemudian (1659), terjadi perdamaian dengan ratu *Taj ul-Alam* (Aceh) dan Balthazar Bort (VOC). Keputusannya Aceh harus membayar ganti rugi ke Belanda 50.000 real. Sejak itu Belanda leluasa di pantai barat Sumatera, sampai ditugaskannya Jacob Groenewegen untuk menguasai daerah-daerah wilayah pantai

barat. Fenomena ini mengawali kokohnya sendi kekuasaan kolonialisme Belanda di pantai barat Sumatera.

Aceh yang bermain di belakang layar ini berdampak kepada keamanan kesultanan Inderapura. Tahun 1660, Inderapura memaksa masuk ke meja runding perjanjian damai di Sungai Bungin (Batangkapas) soal perdagangan lada Inderapura. Fenomena ini membuat Belanda kecewa, belum semua lada ke tangannya, Inggris dan Aceh masih berani mengambil kesempatan dagang gelap lada di pantai barat Sumatera melalui Pelabuhan Inderapura. Karenanya Belanda membangun jaringan dagang, di antaranya tahun 1662 membangun Loji VOC di Pulau Cingkuk berpangkalan pada Pelabuhan Emas Pulau Cingkuk, bersamaan dengan apa yang disebut dengan Sandiwara Batangkape yang intinya "bersandiwara" dengan Belanda dan Aceh.

Perjanjian Painan (*Painansch Contract*)³⁴ yang ditandatangani 6 Juli 1663 adalah sebuah sandiwara lanjutan, yang menyandiwarai Belanda untuk mengusir Aceh, pura-pura berpihak ke Belanda (maling besar) untuk mengusir kekuatan Aceh di Inderapura, Tiku, dan Padang. Tanggal 23 Juli 1663 para pembesar delegasi Perjanjian Painan kembali dari Batavia, dan tanggal 6 Agustus di tahun yang sama, delegasi singgah dan merapat di bandar Inderapura. Di antara mereka ditugasi menemui Raja Muhammadsyah, yang ketika itu disebut-sebut baru kembali menjadi raja. Justru Belanda

³⁴Lihat misalnya W.J.Ade Leeuw, *Het Painasch Contract, Academisch Proefschrift ter verkrijging van den grad van doctor*, Amsterdam: H.J. Paris, 1926.

mendapat angin, tahun 1664, mereka mendirikan lonji VOC di Inderapura.

Konflik ternyata tidak saja mengancam dari perseteruan Belanda, Inggris, dan Aceh dalam berebut kepentingan perdagangan lada di pantai barat, tetapi juga konflik internal sehingga dalam wilayah subkultur Inderapura pun bergolak. Kesultanan Inderapura cukup repot mengahadapinya. Konflik secara silih berganti antara pergolakan di tapal batas sampai ke dalam bermuara pada kepentingan suksesi, terutama pasca-wafatnya Sultan Sulaimansyah tahun 1675.

Berbeda halnya dengan konflik subkultur, misalnya tahun 1682, rakyat Air Haji memberontak terhadap Inderapura. Bahkan dalam catatan Belanda disebut perang Air Haji dan Inderapura. Konflik soal tapal batas wilayah antara dua wilayah yang bertetangga ini masih berlanjut sampai sekarang.³⁵ Konflik tersebut masih seputar monopoli perdagangan lada. Bahkan semakin mengambil bentuknya ketika dipicu oleh pertikaian Belanda dan Inggris yang kembali menghangat. Sebelumnya tahun 1680, perjanjian pemuka kota pantai dari Ombak Ketaun (Pesisir Selatan) hingga Air Bangis (Pesisir Utara dan Pasaman Barat sekarang) ditandatangani oleh Raja Adil dan Muhammadsyah. Perjanjian ini sedikit memberi ruang gerak kepada VOC berdagang lada dan emas. Tahun 1684, Inggris mendirikan Loji di Inderapura, berhadapan dengan lonji VOC di

³⁵Konflik perbatasan Air Haji dan Inderapura ini masih dirasakan dan mengundang Pemda Kabupaten Pesisir Selatan menyelesaikannya, meskipun tidak selesai-selesai juga.

Inderapura yang sudah didirikan lebih awal, tepatnya tahun 1664. Juni 1684, Inggris singgah dan berlabuh di Inderapura untuk meraut lada, namun Belanda bersikap diam dan menahan diri.

Sungguh pun demikian, perang dingin Inggris dan Belanda ini, situasi di Inderapura mencekam, bahkan digambarkan seperti dalam keadaan darurat. Januari 1685, situasi buntu terpecahkan, Belanda minta berunding dengan Inggris atas usul Pariaman. Tetapi justru proses pelaksanaan usaha damai itu mengundang marah besar Belanda. Sebab, Raja Ibrahim (bekas penghulu Pariaman, 1676) ternyata berada di "belakang" usulan Pariaman tersebut. Raja tersebut telah berkelana ke Inderapura dan berdagang lada dengan Inggris di Inderapura pasca-penyerangan kota-kota pantai.

Kemarahan Belanda itu membuat mereka melancarkan strategi politik adu domba, yaitu dengan cara menghasut rakyat agar memerangi Inggris. Ternyata rakyat terhasut, bergolak, dan akhirnya rakyat yang pro-Belanda maupun pro-Inggris berperang. Namun hasilnya tidak menguntungkan Belanda, justru kekuasaannya semakin tergusur. Bahkan lebih parah lagi, kemenakan raja Minangkabau Sultan Abdul Jalil Saruaso berunding dengan raja Inderapura. Hasil perundingan telah memberi kesempatan luas kepada Inggris, dan mengharuskan kepada Belanda untuk menghubungi Inggris jika ingin berdagang lada. Sudah dapat dipastikan bahwa Belanda tidak suka dan marah besar. Terbukti dengan datang perintah keras dari Batavia untuk menghancurkan tanaman lada Inderapura dan di seluruh kawasannya.

Tindakan Belanda yang membabi-butakan menghancurkan lada rakyat dan perdagangan lada, khususnya di pantai barat yang berbasis di pelabuhan Inderapura ini berdampak buruk. Ekonomi perdagangan lada merosot. Keramaian perdagangan internasional di Inderapura lumpuh. Kekuasaan laut di pantai barat serta kekayaan kesultanan Inderapura pada giliran jatuh. Padahal, lada dan laut telah menjadi sumber kekayaan Indrapdura sehingga membuat mereka kaya. Dalam pada itu, konflik Belanda dan Inggris masih tetap menghangat dan memperburuk suasana. Hanya saja, tahun 1685 British East India Company (EIC) berhasil mendirikan pusat perdagangan lada di Bengkulu (*Bencoolen/Coolen*), yang ketika itu masih berada di bawah kekuasaan Inderapura.

Pada bulan Juni 1685, EIC mendirikan Kantor Perwakilan *Settlement* di pusat kekuasaan Kesultanan Inderapura, juga Majunto dan Taluk. Fenomena ini membuat Belanda semakin jengkel, karena Inggris ketika itu juga sudah menguasai Selebar dalam hal pengeksport lada terbesar, bahkan merambah ke utara pantai barat Sumatera. Justru Selebar, Banten, dan Inderapura sejak dahulu memiliki hubungan yang kuat, tidak saja dalam *traveling* perdagangan lada, tetapi juga dalam hubungan perkawinan. Putri Inderapura pernah dikawini pangeran Banten (pembawa Islam) abad ke-15. Hubungan keluarga istana ini berlanjut sampai putri Ambar Syarifah pada abad ke-16 mendapat bagian kekuasaan di Kerajaan Selebar. Belanda (VOC) menjadi

kasak-kusuk dalam rangka mencegah Inggris di Selebar³⁶. VOC menghasut Sultan Banten agar mengklaim bahwa sebagian Selebar diserahkan ke Inderapura.

Inggris tak menghiraukan klaim Belanda. Tahun 1686, Kapal Royal James melakukan unjuk kekuatan, seratus tentara mereka Singgah di Inderapura, namun imperialis ini tidak berhasil meraih lada, karena tiba-tiba mereka diserang penyakit sehingga 30 prajuritnya meninggal. Setahun kemudian, Belanda bermain di balik sikap diamnya dan kembali menghasut rakyat. Agustus 1687, kantor Inggris diserang rakyat Inderapura. Banyak korban berjatuh di pihak Inggris dan meriam mereka juga dirampas. Konflik ini direspons Eropa dengan mengirim 5 kapal sedangkan VOC tetap diam. Dalam bahasa politik, konflik itu seperti arus deras yang mengalir di bawah permukaan. Tidak tanggung-tanggung, Inderapura pun menyerang kekuasaan Sri Ahmadsyah, seorang calon raja Pagaruyung yang lari ke Bengkulu dan dipengaruhi Inggris di era pertikaianya dengan VOC.

Belum lagi selesai konflik dan perang Belanda dan Inggris, tahun 1689 Cina datang pula ke Inderapura dan pantai barat Sumatera untuk berdagang lada. Sementara konflik internal di tubuh Inderapura sendiri sudah mengarah kepada pemekaran wilayah. Arus gerakan pemekaran wilayah

³⁶Kemelut dalam pertikaian Belanda dan Inggris ini berlanjut cukup panjang, terutama dalam hal perebutan lada di pelabuhan Inderapura sebagai pelabuhan terbesar dan embarkasi di pantai barat Sumatera. Perselisihan Inggris Belanda hampir benar-benar diselesaikan dengan perjanjian Paris tahun 1763, yang hasilnya EIC diberi prioritas berdagang di selatan (Majunto – Silebar), sedangkan VOC di utara (Inderapura, Tiku, dan Air Bangis).

itu tidak dapat dibendung sultan. Kekuatan yang pro pemekaran akhirnya dibantu oleh Inggris. Tahun 1695, Mukomuko, Banta, Seblat, dan Ketaun (wilayah Anak Sungai) yang semula bagian dari kerajaan Inderapura menjadi berdiri sendiri, dan diproklamirkan menjadi kerajaan "Anak Sungai" oleh Sultan Gelomatsyah dengan ibu negeri Muko-Muko.

E. Kehidupan Keagamaan

Menelusuri aktivitas kehidupan keagamaan khususnya Islam di Inderapura, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai kontak awal Inderapura dengan agama Islam. Hingga penelitian ini dilakukan, belum ditemukan sumber-sumber yang kuat dan dapat dijadikan "*sanad*" baik lokal maupun asing (Barat) tentang kapan persisnya Islam masuk dan berkembang di Inderapura. Ini disebabkan karena tidak adanya bukti-bukti tertulis dan arkeologis yang berbicara tentang itu. Paling tidak ada beberapa indikator yang dapat menuntun pemahaman kita tentang kapan Islam bersentuhan dengan masyarakat di pesisir barat Sumatera.

Peningkatan pelayaran dan perdagangan berkaitan erat dengan semakin majunya kehidupan ekonomi dan perdagangan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah (750-1258). Semenjak itu jalur pelayaran mulai dari laut Arab, Teluk Persia sampai ke Samudera Hindia semakin ramai. Para saudagar Arab yang selama ini berlayar hanya sampai ke anak Benua India, mulai masuk ke Nusantara dalam rangka

meneruskan perjalanan ke Cina. Sekalipun hanya sekedar transit, pola hubungan tersebut telah bersifat langsung.³⁷

Direbutnya Malaka tahun 1511 oleh Portugis, telah mengalihkan jalur pelayaran internasional yang semula melalui selat Malaka di pantai timur Sumatera ke jalur pantai barat. Peralihan jalur pelayaran ke pantai barat Sumatera ini disebabkan karena Portugis menerapkan “retribusi” yang sangat tinggi di Selat Malaka. Dari pada membayar terlalu tinggi, maka para *musafir* dan saudagar memilih jalan ke pantai barat. Jalur pelayaran ke pantai barat Sumatera ini dikuasai oleh Kesultanan Aceh Darussalam, terutama semenjak Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam hingga beberapa orang sultan setelahnya. Besar kemungkinan bahwa Islam ikut disebarkan seiring dengan masuknya pengaruh Aceh di Pantai Barat Sumatera.

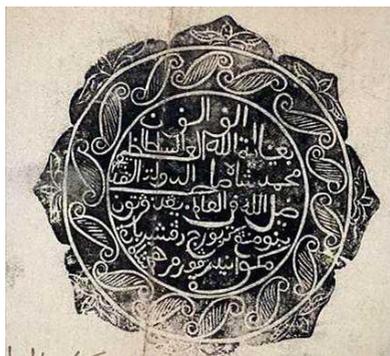
Terlepas dari ketidakjelasan waktu dan siapa yang pertama kali memperkenalkan Islam di kawasan pantai barat Sumatera umumnya dan di Inderapura khususnya, namun dilihat dari tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana yang diceritakan dalam naskah Inderapura, fakta menunjukkan bahwa Islam telah menjadi panutan masyarakat.

Fakta yang dapat dijadikan sandaran untuk membuktikan bahwa Islam telah menjadi panutan adalah dengan penggunaan terminologi “*sultan*”, yang berarti pelindung atau raja, juga istilah “*wazir*” yang berarti menteri dalam lapangan politik dan pemerintahan. Penggunaan istilah

³⁷Lihat M Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hal. 71

sultan telah menjadi umum dalam tradisi pemerintahan kerajaan Islam di Nusantara, yaitu semenjak awal Islam bersentuhan dengan tradisi politik lokal. Perubahan istilah raja menjadi *sultan* menurut Azyumardi Azra, sangat erat kaitannya dengan keinginan para penguasa Muslim di Nusantara untuk diakui sebagai bagian integral dari “*Dar al-Islam*”.³⁸

Untuk itu, mereka berlomba-lomba mendapatkan legitimasi dari penguasa Muslim di Timur Tengah, dalam hal ini dari Turki Usmani sambil menunaikan ibadah haji. Bahkan Kesultanan Aceh Darussalam secara terbuka menyatakan diri bahwa mereka merupakan “*vassal state*” dari Turki Usmani. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa tradisi yang dilakukan para penguasa Muslim Nusantara tersebut juga dilakukan oleh penguasa Inderapura. Sehingga para penguasa Inderapura tidak merasa keberatan mengganti gelar rajanya dengan gelar “*sultan*” agar lebih diakui secara luas.



Cap Mahor (stempel) Kesultanan Inderapura

³⁸Azyumardi Azra, *Renaisans Islam di Asia Tenggara; Sejarah Wacana dan Kekuasaan*.(Bandung: Rosda Karya, 1999), hal. 92. Baca juga M. Shaleh Putuhena, *op.cit.*, hal. 107.

Bunyi Teks:

yang dipertuan benua Minangkabau, raja di pesisir barat makota Inderapura, *marhum syah*".

Teks yang terdapat pada stempel tersebut secara nyata mengukuhkan status Kesultanan Inderapura sebagai pemerintahan yang bercorak Islam.

Penggunaan istilah "*wazir*"³⁹ (menteri) untuk nama jabatan pemerintahan di bawah sultan ternyata telah dipakai oleh Kesultanan Inderapura, terutama berdasarkan sumber lokal yang ada. Ini mengindikasikan bahwa keinginan untuk lebih diakui oleh penguasa Islam di Timur Tengah, khususnya Turki Usmani juga lebih memberi nuansa Islam dalam dinamika politik. Suatu keunikan tersendiri bagi perkembangan struktur birokrasi Kesultanan Inderapura pada saat kekuatan politik lain di Nusantara belum menggunakannya. Sebagaimana diceritakan dalam *naskah MIP*, bahwa *wazir* mantri atau penghulu yang diangkat oleh sultan sebagai pembantunya berjumlah dua puluh orang, terkenal dengan *mantra nan 20*. Makna simbolik yang terpatrit pada angka 20 untuk jabatan *wazir* ini lebih menunjukkan kepada jumlah sifat Allah yang dua puluh.

Pola keberagaman di Kesultanan Inderapura dapat dicermati dari upaya sultan menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Seluruh norma adat dan hukum

³⁹Istilah "*wazir*" dalam struktur birokrasi Kesultanan Inderapura lebih merujuk kepada pengertian "mantri (menteri) nan 20 sebagai pembantu sultan (raja) dalam menjalankan roda pemerintahan. Lihat :*Naskah MIP*, hal. 218, 225, 226, 228.

disesuaikan menurut hukum syarak. Tatacara pemerintahan, hukum, dan adat istiadat masyarakat diteruskan kepada keturunannya, anak cucunya sebagai pewaris kerajaan. Begitu pula tentang tatacara pemerintahan, hukum, dan adat istiadat kerajaan selalu disempurnakan sepanjang jalan sejarahnya. Falsafah kerajaannya berbunyi:

“Raja Inderapura adalah raja syara’, patah tumbuh hilang berganti, hilang raja berganti raja. Beredar raja dengan syara’, berdestar *syahid syaibilillah*. Bersatu sultan dengan rakyat, beredar sultan dengan adat. Beredar sanak kemenakan dengan adat pusako. Mengitari bumi se-petalo langit, ke bawah dalam, keawan tinggi, pergi satu tumbuh seribu.”⁴⁰

Falsafah di atas menggambarkan bahwa sultan sebagai seorang raja atau kepala pemerintahan di Inderapura, mestilah seorang yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Kain “ikek” destar sebagai lambang *syahid fi sabilillah*. *Syahid* di dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Tetapi di dalam menghadapi rakyatnya, seorang sultan lebur di tengah-tengah masyarakatnya. Sultan bertindak sesuai dengan Adat yang telah digariskan sebagai undang-undang. Adat tersebut telah beredar di tengah anak kemenakan sebagai adat pusaka, sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bersama yang tentram, damai, dan sejahtera. Dengan dasar falsafah hidup yang demikian, walaupun hilang, tetapi akan tumbuh lagi generasi baru yang lebih banyak.

⁴⁰Yulizal Yunus, *op.cit.*, hal. 97. Emral Jamal, *op.cit.*

Dalam hal mengatur tata kehidupan masyarakat, nuansa keislaman begitu kental terlihat. Sultan dan para pembantunya berpedoman kepada ikrar dan sumpah yang diucapkan ketika dinobatkan sebagai lembaga eksekutif, sebagaimana yang tertera dalam *Naskah MIP* sebagai berikut:

“Raja atau sultan pegang kuat kunci adat, wazir atau penghulu pegang kuat peti adat, isinya sama-sama dijaga sultan, seboleh-bolehnya, sehabis-habisnya, kuat menguatkan segala adat, wazir penghulu-penghulunya sampai ke tanah tigo lurah. Dan penghulu-penghulu mesti pegang teguh adat dan persusunan sultan, persusunan nagari sama-sama dikuatkan yang telah disusun oleh nenek moyang. Segala sesuatu yang akan diperbuat diambil dengan kato ber-iyo. Sultan menjadi syarat, penghulu menjadi sifat⁴¹, tidak bercerai keduanya. Nagari sama-sama diperintah, kaum sama-sama dijaga, sama-sama mencari jalan kebaikan dan keuntungan”.⁴²

Setelah sumpah dan ikrar selesai diucapkan, dilanjutkan dengan meminum surat *Yâsîn*, membaca surat *al-Fâtihah*, dan membaca doa. Doa dibaca oleh orang “*siak*” dari Lunang, yakni Malin Sutan. Sumpah dan ikrar berlaku untuk sultan dan para pewarisnya serta waris penghulu. Sumpah yang telah diucapkan tidak boleh dilanggar atau diubah. Siapa yang melanggar, akan dikutuki Allah, dikutuki rasul, dimakan kalimah Allah dan dimakan *biso kawi* alam Minangkabau.

⁴¹*Naskah MIP*, hal. 225.

⁴²*Ibid.*, hal. 224.

Teks tersebut di atas menunjukkan bahwa norma-norma Islam begitu mengkrystal dan mentradisi dalam kehidupan masyarakat. Semua aspek didasarkan kepada nilai-nilai keagamaan yang cukup mapan. Sebagai implementasi dari pola keberagaman yang sudah mapan tersebut, maka sultan memerintahkan agar dibangun masjid di setiap nagari di bawah kekuasaan Inderapura. Khusus untuk masyarakat yang berada di pusat pemerintahan, dibangunlah masjid sebagai tempat ibadah dan tempat sultan bertemu dengan masyarakat luas, di samping istana sultan yang pada saat-saat tertentu juga melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan istana.⁴³ Di samping membangun masjid untuk kegiatan ibadah di setiap *nagari*, Kesultanan Inderapura juga telah memiliki mushaf Al-Qur'an yang ditulis oleh kaligrafer istana.⁴⁴ Hingga kini, mushaf Al-Qur'an peninggalan Kesultanan Inderapura masih eksis dan tersimpan dengan baik di rumah pewaris sah Kesultanan Inderapura.



Dua buah mushaf Al-Qur'an milik Kesultanan Inderapura yang ditulis atas perintah Marah Muhammad Baki Sultan Firmansyah, tahun 1834

⁴³*Ibid.*, hal. 210.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 213.

Sebagai kesultanan yang menerapkan perpaduan sistem yang berlaku dalam Islam dengan tradisi adat Minangkabau, maka untuk mengatur dan mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan agama, dibentuklah lembaga yang mengurus masalah keagamaan, yakni *imam* dan *khatib*⁴⁵ sebagai *suluah bendang* dalam nagari. Lembaga inilah yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah agama. Tempat orang bertanya tentang masalah agama, tempat sultan bermusyawarah tentang masalah keagamaan. Bahkan lembaga *imam* dan *khatib* ini dibentuk di setiap nagari di wilayah Kesultanan Inderapura.

Suasana keagamaan dan keakraban yang selalu dibina oleh sultan dengan masyarakat di Kesultanan Inderapura, antara lain terlihat ketika datangnya bulan Ramadhan dan menyambut Idul Fitri. Dalam suasana menyambut *Idul Fitri* dan *Idul Adha*, sultan dengan para pejabat kerajaan membaur bersama masyarakat seraya mengadakan takbir bersama, bahkan hingga waktu subuh datang. Dengan menggunakan peralatan-peralatan pengiring, seluruh masyarakat dan para pemimpin tunduk dan patuh di hadapan Allah swt.⁴⁶

⁴⁵Yulizal Yunus, *op.cit.*, hal. 95

⁴⁶*Naskah MIP*, hal. 209, 210 dan 211.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, corak pemerintahan di Kesultanan Inderapura dapat dibagi menjadi dua model, yaitu pemerintahan di bawah kekuasaan *kesultanan* dan pemerintahan di bawah kekuasaan *ke-regen-an*. Rentang waktu pemerintahan kesultanan jauh lebih lama dan panjang dibanding dengan masa pemerintahan *ke-regen-an*. Model terakhir ini merupakan jabatan pemerintahan yang diciptakan oleh Belanda, sebagai cara untuk mengakhiri secara bertahap pemerintahan kesultanan.

Perubahan pola kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Kesultanan Inderapura mengindikasikan adanya upaya pengukuhan formal, sebagai salah satu sistem kekuasaan yang bercorak Islam. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar sistem birokrasi yang dijalankan antara kerajaan dan kesultanan. Sistem pemerintahan di Kesultanan Inderapura dijalankan oleh tiga lembaga yang berwenang, yakni kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif.

Kewenangan lembaga **eksekutif** dipegang oleh sultan sebagai penguasa tertinggi. Sultan dibantu oleh *mangku rajo* (wakil sultan), sedangkan dewan menteri dipimpin oleh *mangkubumi*. *Penghulu nan duo puluah* (wazir/menteri) adalah

pelaksana pemerintahan sehari-hari yang bertanggung jawab kepada sultan melalui mangkubumi.

Kewenangan **legislatif** kesultanan dijalankan oleh pucuk adat. Pucuk adat terdiri dari para penghulu dan orang kaya yang mewakili Balai Kerapatan Adat Nagari. Lembaga yang disebut terakhir ini merupakan Dewan Perwakilan Rakyat yang dijabat oleh para penghulu yang mewakili anak kemenakan masing-masing.

Sedangkan kewenangan **yudikatif**, meskipun otoritas legislasi di Inderapura diputuskan berdasarkan permusyawaratan *pucuk adat* secara bertingkat dari unsur pimpinan penghulu ninik mamak, namun kekuasaan kehakiman dan penuntutan dipegang secara langsung oleh Sultan bersama dengan alat-alat kekuasaannya. Sistem kekuasaan di kesultanan ini tidaklah bersifat otokratis murni, sebagaimana layaknya kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya. Meskipun keputusan terakhir tetap berada di tangan Sultan, namun keputusannya tetap didasarkan pada hasil pertimbangan musyawarah lembaga-lembaga perwakilan serta pertimbangan kebiasaan tradisional (*alua*) dan kebaikan bersama (*patuik*).

Manajemen pemerintahan dan pola pendistribusian kewenangan dalam Kesultanan Inderapura merujuk kepada regulasi dan kebijakan publik. Pendistribusian kewenangan tersebut sesuai dengan struktur kabinet kesultanan yang ada. Mekanisme kewenangan tersebut berkaitan dengan pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab.

Sementara itu, mekanisme suksesi kepemimpinan sultan Inderapura sudah nampak berputar, meskipun tidak seteratur seperti sekarang. Namun yang jelas, perputaran pola kepemimpinan tersebut sudah menyebar dan dapat dilihat dalam masa satu abad, yaitu dari tahun 1513 sampai tahun 1695. Dalam perputaran mekanis kepemimpinan itu memperlihatkan adanya syarat dan kriteria pencalonan sultan, kampanye calon sultan, pemilihan sultan, dan pengukuhan sultan (naik nobat).

Terjadinya konflik internal dan eksternal di Kesultanan Inderapura, sesungguhnya dapat dimaknai sebagai upaya mempertahankan identitas, harkat, martabat, integritas, dan keberlangsungan kehidupan kesultanan serta ketenteraman rakyat, baik untuk kepentingan kelompok keluarga kerajaan maupun kepentingan pelayanan publik dan kolonialisme (penjajah). Konflik tersebut justru muncul saat kejayaan dan kemakmuran sudah mengambil bentuk, dan melahirkan kelompok yang skeptis. Oleh karena itu, konflik yang terjadi di Inderapura berakar dari percaturan politik dan ekonomi dunia ketika itu, yang berdampak serius kepada kesultanan.

Kebesaran Kesultanan Inderapura juga dapat dilihat dari aktifitas keberagaman yang cukup mengakar. Ini dapat dilihat dari penggunaan terminologi *sultan* dan *wazir* (menteri/penghulu) untuk jabatan pemerintahan, yang merupakan representasi dari keterikatan dengan agama Islam yang dianut. Bahkan untuk mendapatkan legitimasi jabatan sultan tersebut, besar kemungkinan harus melalui legitimasi dari penguasa Turki Usmani di Timur Tengah sambil pergi

menunaikan ibadah haji. Islam dijadikan sebagai agama resmi Kesultanan Inderapura dan seluruh adat serta hukum didasari oleh hukum syarak. Masjid pun dibangun sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan jaringan komunikasi antara sultan dengan rakyat.

Pertumbuhan dan kejayaan Inderapura sebagai sebuah kerajaan Islam pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kekayaan alam yang dihasilkannya, terutama lada dan emas. Kedua komoditas inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa lain bersaha untuk dapat melakukan kontak dagang, yang bahkan pada akhirnya menguasai komoditas tersebut. Tercatat ada beberapa kekuatan asing yang pernah menanamkan pengaruhnya di Inderapura seperti Aceh, Inggris, Belanda, Portugis, bahkan juga Cina. Kekayaan hasil bumi inilah yang membuat Inderapura tumbuh menjadi kota dagang dan kota maritim internasional, tetapi karena hal itu pula yang kemudian membuat kesultanan ini lenyap dari sejarah dan kebesarannya.

B. Saran

Kajian terhadap sejarah Kesultanan Inderapura di pesisir selatan Sumatera Barat berdasarkan sumber-sumber lokal hingga kini belum banyak dilakukan. Padahal, kesultanan ini di masa lalu merupakan salah satu kesultanan besar, khususnya di kawasan pantai barat Sumatera. Inderapura tidak hanya tumbuh sebagai kerajaan Islam dengan segala aspeknya, akan tetapi juga merupakan salah satu pelabuhan dagang terpenting bagi kapal-kapal dagang

asing. Oleh karenanya terbuka peluang bagi kalangan sejarawan akademis untuk mengkaji lebih intensif berbagai aspek sejarah kesultanan ini di masa mendatang.

Salah satu hambatan dalam penelitian sejarah Kesultanan Inderapura adalah ketersediaan sumber yang masih minim. Persoalannya bukan terletak pada ketidakterediaan sumber tertulis, akan tetapi karena masyarakat yang menyimpan sumber-sumber itu belum bersedia membuka manuskrip-manuskrip tersebut untuk keperluan penelitian. Alasannya sangat subjektif, yakni karena “memegang wasiat” nenek moyang agar manuskrip tersebut tidak boleh dibuka kepada publik. Dalam tataran yang lebih ekstrim, jika dibuka ke publik akan berpengaruh buruk kepada keluarga penyimpan manuskrip. Padahal, jika dilihat secara jernih, persoalannya tidak serumit yang diperkirakan. Bagaimana pun juga, tradisi budaya yang dibuat pada masa lalu pada hakekatnya adalah warisan bagi generasi berikutnya. Tidak hanya untuk jadi bahan pajangan dan simpanan.

Akan halnya tradisi budaya dalam bentuk tertulis, akan lebih bermanfaat dan bermakna keberadaannya jika dapat memberikan informasi kepada orang yang mempelajarinya. Informasi itu akan diperoleh jika telah melalui proses kajian, penelitian, dan sebagainya. Hal-hal yang baik akan diteruskan dan dilestarikan. Hal-hal yang tidak baik tentu akan dilakukan perbaikan di masa datang. Untuk itu, sangat diperlukan keterbukaan masyarakat yang menyimpan berbagai naskah dan manuskrip, terutama

tentang Inderapura agar kebesaran dan kejayaannya dapat diangkat ke permukaan, sebagai aset berharga dari sejarah dan budaya bangsa. Artinya, kita tidak hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut, akan tetapi memiliki bukti otentik tentang kesultanan ini sehingga tidak terjadi pemutarbalikan fakta sejarah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Harapan dan perhatian yang sama juga diharapkan datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebab, Kesultanan Inderapura adalah aset sejarah daerah yang sangat berharga. Sejarah daerah ini merupakan bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia dalam arti luas. Jika ia diperhatikan dan dikelola secara serius, maka akan menumbuhkan kesadaran sejarah yang sangat tinggi. Pengelolaan Inderapura sebagai kawasan situs sejarah dan budaya tentu akan mendatangkan minat yang cukup besar bagi para peneliti, terutama yang ingin mencari tahu di mana situs kerajaan Inderapura yang dahulu pernah tumbuh sebagai sebuah kerajaan besar.

Hanya saja, ketika penelitian ini dilakukan semua aset peninggalan sejarah Kesultanan Inderapura kondisinya sangat memprihatinkan, tidak terurus, dan bahkan sudah banyak yang rusak. Jika ini tidak cepat diselamatkan, maka sejarah Kesultanan Inderapura yang pernah berjaya di masa lalu akan semakin terlupakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Naskah (Manuskrip)

Naskah (Manuskrip) Inderapura.

Imam Maulana Abdul Manaf, *Muballighul Islam*, Padang:
Batang Kabung, t.t.

Naskah Tambo Minangkabau

B. Arsip

Arsip Nasional RI, SWK No.6/25, "Contract Gesloten door R.
Palm met de Regent van Indrapoera", 14 October
1774.

Arsip Nasional RI, SWK No.33 c, "Verbond Indrapoera", 27
Juli 1663 dan 29

December 1676.

Arsip Nasional RI, SWK No.33 c, "Contract Indrapoera", 16
May 1660.

Arsip Nasional RI, SWK No. 151/17, "Indrapoera".

C. Buku-Buku

A. A. Navis, 1986. *Alam Terkembang Jadi Guru; Adat dan
Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Grafitipers,
cet. ke-2.

- Amran Isa, "Peranan Adat dalam Pembangunan Nagari Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat", *Makalah*, Musyawarah Pembangunan Nagari Inderapura (Musbang) II, tanggal 12 September 1993.
- Armando Cortesao, 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires* (London: Haklyut Society)
- Azyumardi Azra, 1997. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. (Bandung: Mizan)
- , 2002. *Jaringan Global dan Lokal Islam di Nusantara*. Bandung: Mizan
- , 1999. *Renaisans Islam di Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: Rosdakarya.
- Badan Pekerja Pucuk Adat Alam Minangkabau dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 2012. *Direktori Pamangku Adat Alam Minangakabu*.
- C.E. Bosworth, 1980. *The Islamic Dynasties*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Cristine Dobbin, 1983. *Islamic Revivalisme in a Changing Peasant Economy, Central Sumatra, 1784-1847*. Malmo: Curzon Press
- Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* (2de Deel) ('s-Gravenhage, Leiden: Martinus Nijhoof, E.J. Brill, 1918
- Ghulam Nabi Ganai, "Muslim Thinkers and Their Concept of Khalifah", dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XXIV, No. 1, January-March 2001

- Gusti Asnan, 2007. *Dunia Maritim di Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- G.J. Renier, 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, terjemahan dari buku aslinya dengan judul *History Its Purpose and Methode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamka, 1994. *Dari Perbendaharaan Lama*. Jakarta: PustakaPanjimas
- Hendrik, Kroeskamp, 1931. *De Westkust en Minangkabau*. Utrecht: Fa. Schotanus & Jens
- Iim Imaduddin, et. al., 2004. *Inderapura Kerajaan Maritim dan Kota Pantai di Pesisir Selatan Pantai Barat Sumatera*. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Imam Maulana Abdul Manaf, *Muballighul Islam*, (transliterasi: Irhash A. Shamad 2004) Padang: Museum Adityawarman
- J. Kathirithamby-Wells, "The Inderapura Sultanate: The Foundations of Its Rise and Decline, from the Sixteenth to the Eighteenth Centuries", *Indonesia*, edisi 21-April 1976
- , 1969. "Acehnese Control over West Coast of Sumatra up to the Treaty of the Painan 1663", dalam *Journal of Southeast Asia History*. X.
- K. Ali, 1997. *Sejarah Islam dari Awal hingga Runtuhnya Dinasti Usmani (Tarikh Pramodern)*, terjemahan dari *A Study of Islamic History*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lewis Bernard, 1967. *Arabs in History*, New York: Harper and Row.

- Louis Gottschalk, 1975. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press.)
- Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 1990. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*. (Jakarta: Balai Pustaka)
- M.A.P. Meilink-Roelofsch, 1962. *Asia Trade and European Influence in the Indonesia Archipelago between 1500 and about 1630* (Den Haag: Martinuds Nijhoff)
- M.D. Mansoer, et. al., 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara,
- Ministerie van Marine, Afdeeling Hydrographie, 1899. *Zeemansgids voor den Oost-Indisches Archipel* (Deel I). 's-Gravenhage: Mouton & Co.
- M. Joustra, 1923. *Minangkabau: Overzicht van Land, Geschiedenis en Volk* (Leiden: Drukkerij Louis H. Becherer, 1923)
- Muhammad Saleh Dt. Orang Kaja Besar, 1965. *Riwayat Hidup dan Perasaan Saja* [Terj. S.M. latif] (Bandung: Badar).
- M. Shaleh Putuhena, 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS
- Nia Kurnia Sholihat Irfan, 1983. *Kerajaan Sriwijaya*, Jakarta: Girimukti Pusaka
- Nur Sutan Iskandar, 1943. *Hulubalang Raja: Kejadian di Pesisir Minangkabau Tahun 1662-1667*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- P.A. Tiele, 1888. "De Europeer in den Indische Archipe, 1507-1525", dalam *BKI*, IV,1

- Rusli Amran, 1981. *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*, (Jakarta: Sinar Harapan)
- , 1985. *Sumatera Barat Plakat Panjang*, (Jakarta: Sinar Harapan)
- Sartono Kartodirdjo, 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia)
- Susanto Zuhdi, 2010. *Sejarah Buton yang Terabaikan; Labu Rope Labu Wana*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Taufik Abdullah, 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press.)
- , 1996. *Sejarah Umat Islam Indonesia*. (Jakarta: MUI)
- R. Soekmoeno, 1984. *Sejarah Kebudayaan Indonesia III*. (Yogyakarta: Kanisius)
- William Marsden, *The History of Sumatera* [Reprint, the 3rd ed.]. (Singapore, Oxford, New York: Oxford University Press, 1986)
- , 1999. *Sejarah Sumatera*, (terjemahan: A.S. Nasution, dkk), Bandung: Remaja Rosdakarya.
- W.J.A de Leeuw, 1926. *Het Painsch Contract, Academisch Proefschriftterverkrijging van den grad van doctor*, Amsterdam: H.J. Paris.
- Yulizal Yunus, 2002. *Kesultanan Indrapura dan Mandeh Rubiyah di Lunang, Spirit Sejarah dari Kerajaan Bahari sampai Semangat Malayu Dunia*. Pemda Kab. Pesisir Selatan – IAIN IB Press.

-----, 2000. *Sejarah Pesisir Selatan dari Sandiwara Batang Kapas hingga Perang Bayang*. (Padang: IAIN IB Press).

D. Artikel Internet

Emral Jamal Dt. Rajo Mudo, dalam:
http://rusdalf.blogspot.com/2012/03/menelusuri_jejak-sejarah-dan-salasilah.html, diunduh tgl, 10 Oktober 2012.

E. Sumber Lisan (Wawancara)

1. Zainul Arifin Sultan Alamsyah
2. Zalfitri
3. Bukhsaruddin
4. Mar Alamsyah Sultan Daulat
5. Sutan Syarifuddin

LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Pakaian Kebesaran Kesultanan Inderapura (baju penobatan sultan,
tongkat kebesaran sultan)*



Rumah Asli Mangkubumi Kesultanan Inderapura



Puing-puing tangga istana Kesultanan Inderapura



Sungai Muaro Sakai. Sungai inilah yang menjadi saksi bisu kebesaran Inderapura sebagai Bandar dagang intrnasional dan kerajaan/kesultanan maritim. Terletak lebih kurang 7 (tujuh) km dari garis pantai. Sungai ini pula yang menjadi saksi keruntuhan Kesultanan Inderapura tersebut. Hasil bumi Inderapoera dan daerah sekitarnya diangkut melalui jalur sungai ini oleh kolonial setelah terlebih dahulu ditumpuk dihanggar pelabuhan dagang Inderapoera yang juga terletak di dekat sungai itu.



Sekarang bangunan ini digunakan sebagai kantor pemerintahan nagari, tapi dulu bangunan ini adalah gudang penyimpanan garam sebagai bahan barter dengan komoditas lada masyarakat.



Bekas hanggar bongkar muat tempat penumpukan sementara komoditas hasil bumi Inderapura (lada, kopi, dan lain-lain) dibangun Belanda dekat sungai Muaro Sakai yang juga menjadi pelabuhan penting Inderapura masa lalu. Bahan-bahan bangunan hanggar ini masih asli



Saluak kebesaran sultan, carano, gelas, pedang peninggalan Kesultanan Inderapura



Plakat anugrah kesetiaan yang diberikan Belanda kepada sultan Inderapura



Pedang Kesultanan Aceh Darussalam yang dihadiahkan kepada Kesultanan Inderapura



Tombak Janguik Janggi – Kesultanan Inderapura



Saluak Kebesaran yang digunakan pada saat penobatan sultan-sultan Inderapura



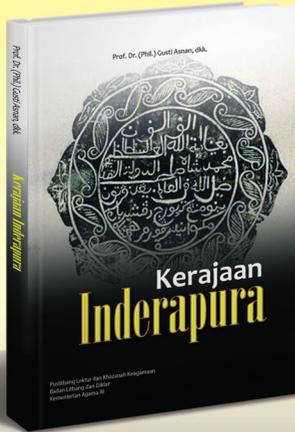
Meriam peninggalan Kolonial Belanda di Inderapura



Makam raja-raja Inderapura



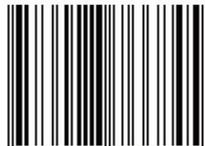
Marah Rusli Sultan Firmansyah
Generasi terakhir Kesultanan Inderapura yang diangkat sebagai
Regent Inderapura oleh Kolonial Belanda



Kesultanan Inderapura sebuah kesultanan yang terletak di kawasan pantai barat Sumatera, di Pesisir Selatan Sumatera Barat, belum memperoleh porsi yang memadai dalam studi Sejarah Islam di Indonesia, pada hal dilihat dari sejarahnya, kesultanan ini telah memberikan sumbangan berharga bagi perjalanan sejarah Islam di daerah ini dan memberikan warna tersendiri dalam percaturan politik Islam di nusantara pada masa lalu.

Penelitian dan penulisan sejarah kesultanan yang ada saat ini ternyata hanya didominasi tentang kesultanan-kesultanan yang 'dianggap besar' dan 'berjasa besar' dalam membangkitkan kesadaran akan eksistensi identitas kebangsaan dan keislaman di nusantara. Beberapa di antaranya yang sudah banyak ditulis dan diteliti adalah seperti Kesultanan (kerajaan) Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Kerajaan Malaka, Kerajaan Riau Lingga, Kesultanan Palembang, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, Kesultanan Demak, Kesultanan Goa, Kesultanan Ternate dan Tidore, dan lain-lain sebagainya.

ISBN 978-602-8766-84-5



9 786028 766845 >